

BERLAYAR TANPA JEDA

Merancang Ekosistem Demokrasi
Melawan Kembalinya Otoritarianisme di Indonesia



Reflection Note

Disusun oleh YAPPIKA untuk Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025

Tim Penyusun

Amalinda Savirani

Fransisca Fitri

Ifziwarti

Riza Imaduddin Abdali

Rokhmad Munawir

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA)

Kompleks Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7, RT. 6/RW. 10 Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Telepon: (021) 21018030

E-mail: office@yappika-actionaid.or.id

Website: www.yappika-actionaid.or.id

Daftar Isi

Daftar Tabel dan Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
KATA PENGANTAR	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Pendahuluan	x
Refleksi Utama	xi
Butir-butir Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	xii
1. Pengantar	1
1.1. Demokrasi Indonesia di tepi jurang dan strategi kolektif OMS	1
1.2. Partisipan dan pengaturan sesi	4
2. “Ekosistem Demokrasi”: Opsi Kerangka dan Model Strategi Kolektif OMS Melawan Otoritarianisme	7
2.1. Lanskap OMS, gerakan rimpang, dan peluang yang tersedia	7
2.2. Mendorong pertautan melalui model “ekosistem demokrasi”: kerangka berpikir dan strategi	9
2.2.1. Demokrasi substantif	9
2.2.2. Teori Ekosistem Demokrasi	10
2.2.3. Merancang Ekosistem Demokrasi	12
3. Butir-Butir Catatan Refleksi	17
3.1. Refleksi 1: Pentingnya meluaskan aktor, prinsip, dan strategi merebut ruang di tingkat lokal untuk memperluas dan mengonsolidasi strategi perlawanan masyarakat sipil melawan peningkatan otoritarianisme	17
3.2. Refleksi 2: Pentingnya mengenali tipe ancaman pada masyarakat sipil dan kesiapan menanganinya	18
3.3. Refleksi 3: Pentingnya memperkuat kondisi internal organisasi masyarakat sipil, menggunakan pendekatan interseksionalitas, intergenerasi, dan keamanan menyeluruh (<i>holistic security</i>)	20
3.4. Refleksi 4: Pentingnya memperkuat dan memperluas ‘ekosistem pendukung’ yakni media alternatif sebagai konter narasi untuk memperkuat agenda tautan (<i>uniting</i>) gerakan OMS	23
3.5. Refleksi 5: Sentralnya peran gerakan tapak (<i>grassroot</i>) dalam memperluas gerakan OMS, sekaligus yang mengalami ketidakadilan	24
4. Berlayar Tanpa Jeda: Butir-Butir Rekomendasi	31
Referensi	36

Daftar Tabel dan Gambar

Gambar 1. Aksi #Indonesia Darurat 2025 dan sebarannya di seluruh Indonesia	8
Gambar 2. Aksi #Indonesia Gelap dan sebarannya di seluruh Indonesia	8
Gambar 3. Cara kerja OMS Indonesia berdasarkan fungsi	13
Gambar 4. Langkah pengembangan ekosistem demokrasi melawan otoritarianisme	15
Gambar 5. Variasi ancaman pada warga sipil	19
Gambar 6. Prasyarat mendorong gerakan berbasis interseksionalitas dalam gerakan masyarakat sipil	22
Gambar 7. Model “ekosistem demokrasi” di Indonesia	32
Gambar 8. Langkah merancang ekosistem demokrasi dalam rangka mendorong pertautan	34

Daftar Singkatan

AJI	Aliansi Jurnalis Independen
BB	Bandung Bergerak
CRM	Crisis Response Mechanism
CSO	Civil Society Organisation
dkk	dan kawan-kawan
ES	Ekosistem
GEMAWAN	Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri
FESTIVIS	Festival Aktivis Muda dalam Gerakan Sosial Indonesia
FITRA NTB	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat
HAM	Hak Asasi Manusia
ICSF	Indonesia Civil Society Forum
INKLUSI	The Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society
INSPIRIT	Inspirasi Tanpa Batas
Jokowi	Joko Widodo
KKB	Koalisi Kebebasan Berserikat
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOMPAKS	Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual
KSIG	Keberagaman Seksual dan Identitas Gender
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Perda	Peraturan Daerah
PM	Project Multatuli

PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PSN	Proyek Strategis Nasional
PR	Pekerjaan Rumah
RUU	Rancangan Undang-Undang
RUU PPRT	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
SANTAI NTB	Yayasan Tunas Alam Indonesia Nusa Tenggara Barat
SDM	Sumber Daya Manusia
SOMASI NTB	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat
SP	Solidaritas Perempuan
TAuD	Tim Advokasi untuk Demokrasi
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU KPK	Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU KUHP	Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU KUHP	Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Minerba	Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU TNI	Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia
UU TPKS	Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
V-Dem Institute	Varieties of Democracy Institute
YAPPIKA	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
Yayasan PEKKA	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

KATA PENGANTAR

Meskipun sempat mengalami penundaan, kegiatan nasional Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025 akhirnya telah diselenggarakan pada tanggal 5–6 November 2025. ICSF 2025 ini mengambil tema **Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan, Menaut Gerak Masyarakat Sipil**. Lebih dari sekadar rangkaian kata, tema ini adalah sebuah mandat dan pernyataan sikap masyarakat sipil di tengah situasi politik nasional yang kian kompleks. Dinamika politik terkini menuntut kita untuk tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat isu yang sempit. Ketika demokrasi diuji, keadilan tidak akan datang dengan sendirinya; ia harus dituntut melalui konsolidasi yang solid. Forum ini mencatat betapa pentingnya “menaut gerak”. Di tengah upaya fragmentasi terhadap gerakan masyarakat sipil, pertemuan ini menjadi ruang aman untuk saling belajar, berbagi strategi, dan menyelaraskan langkah. Kita menyadari bahwa membela demokrasi bukan hanya tentang melawan represi, tetapi juga tentang membangun narasi tanding yang inklusif dan mampu menjangkau akar rumput.

ICSF 2025 mendialogkan tiga pokok bahasan, yaitu membela demokrasi sebagai topik utama diskusi paralel hari pertama, menuntut keadilan untuk diskusi paralel hari kedua, kedua tema tersebut juga menjadi topik utama untuk diskusi pleno di hari pertama, dan menaut gerak masyarakat sipil untuk diskusi pleno serta refleksi kunci di hari kedua. Secara umum format penyelenggaraan ICSF 2025 tidak jauh berbeda dari sebelumnya dengan menghadirkan pembicara kunci, talkshow, refleksi dan pembelajaran, diskusi paralel, diskusi pleno, serta sesi pembaruan dan pemeriksaan skenario masyarakat sipil yang dihasilkan dari ICSF 2024. Hal yang berbeda adalah adanya pameran bertema Menapaki Jejak, Menembus Tirai: Tentang Ruang, Waktu, Suara, dan Tumbuh Bersama. Terbagi dalam dua bagian, yaitu Arsip Gerak dan Perawatan yang menampilkan perjalanan ICSF sejak 2018 hingga 2025, dan *Layer of Solidarity* yang menghadirkan jejak dan perjuangan 13 aktor masyarakat sipil, pameran ini bertujuan untuk merayakan 8 tahun ICSF.

Forum dihadiri oleh 299 peserta (dengan persentase perempuan mencapai 67%) yang bekerja pada 11 sektor/fokus isu dari 31 provinsi, mewakili OMS, pembicara, komite penyelenggara, komite pengarah, fasilitator, tim media sosial, dan tim pendukung untuk layanan medis, psikososial, dan hukum. Kehadiran tim pendukung untuk pertama kalinya dalam ICSF ini mendapatkan sambutan baik dari peserta dengan memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan.

Penyelenggaraan ICSF 2025 semakin menunjukkan penguatan kepemilikan lokal, di mana YAPPIKA memimpin penyelenggaraan kegiatan ICSF nasional, Yayasan Humanis mengelola kegiatan ICSF regional melalui kerja sama dengan GEMAWAN (untuk Sumatera

dan Kalimantan), Peace Generation (untuk Jawa dan Bali), serta FITRA-NTB, SOMASI-NTB, dan SANTAI-NTB (untuk Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua), serta Pamflet Generasi menginisiasi forum orang muda FESTIVIS (Festival Aktivistis Muda dalam Gerakan Sosial Indonesia). Seluruh rangkaian kegiatan ICSF 2025 didukung oleh Komite Pengarah yang beranggotakan OMS, para ahli, dan mitra-mitra pembangunan, serta Ford Foundation sebagai Ketua Komite Pengarah dan Komite Penyelenggara. ICSF 2025 ditutup dengan sesi serah terima mandat ICSF dari Ford Foundation kepada 4 OMS anggota Komite Penyelenggara, yaitu YAPPIKA, Yayasan Humanis, Peace Generation, dan Pamflet Generasi.

Reflection Note ini ditulis sebagai kristalisasi dari seluruh dialektika, keresahan, dan harapan yang muncul selama ICSF berlangsung. Tim Penulis YAPPIKA berupaya untuk merangkum, mengklaster, serta menganalisis hasil diskusi yang sangat kaya baik dari ICSF nasional maupun regional, dan selanjutnya menyusun rekomendasi yang bersifat operasional. Kami memilih untuk mengusulkan rekomendasi yang menekankan aspek *how*, dibanding hanya aspek *what*. Rekomendasi dalam *Reflection Note* ini perlu diperlakukan sebagai *work-in-progress* untuk dibahas melalui berbagai kegiatan post-ICSF dan perlu diadaptasi secara berkelanjutan agar tetap relevan.

Keberhasilan penyelenggaraan ICSF 2025 dan tersusunnya *Reflection Note* ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, para pembicara kunci, penyelenggara dan pembicara 10 diskusi paralel, pembicara sesi-sesi diskusi panel, mitra-mitra strategis, fasilitator, tim pendukung, komite pengarah, dan komite penyelenggara. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca kritis: Dr. Meuthia Ganie Rochman, Profesor Edward Aspinall, dan Hans Antlöv atas masukan dan kritik tajam terhadap draf awal *Reflection Note*.

Kami berharap *Reflection Note* ini dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi masing-masing maupun secara bersama dan, yang lebih penting, menjadi pijakan untuk aksi nyata.

Selamat membaca dan terus berjuang.

Penyelenggara ICSF 2025

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Catatan refleksi ini disusun berdasarkan rangkaian diskusi dan kegelisahan kolektif, dan upaya mencari solusinya, dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025. Mengusung metafora “**berlayar tanpa jeda**”, dokumen ini menggambarkan upaya organisasi masyarakat sipil (OMS) yang “dipaksa” untuk terus memikirkan dan melakukan strategi konsolidasi demokrasi dan perbaikan internal di tengah badai kemunduran demokrasi dan tekanan politik domestik dan global yang tidak menentu. Indonesia tidak hanya menghadapi krisis demokrasi, tetapi juga krisis-krisis lain (polikrisis) yang melibatkan dimensi ekonomi, ekologi, dan penegakan hukum.

Catatan Refleksi ini berdasarkan pada kegiatan ICSF 2025 bertajuk “**Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Menaut Gerak Masyarakat Sipil**”. Forum dilangsungkan di Jakarta pada 5–6 November 2025, dan dihadiri lebih dari 260 peserta dari 31 provinsi. Sebelum penyelenggaraan di Jakarta, dilangsungkan ICFS di tiga region, yakni di Pontianak, Kalimantan Barat, untuk wilayah Indonesia Barat (diselenggarakan pada 19–21 Agustus 2025), di Bandung untuk wilayah Jawa dan Bali (diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2025), dan wilayah Indonesia Timur yang dilangsungkan secara daring (*online*) pada 20 Oktober 2025, karena mempertimbangkan situasi keamanan yang tidak kondusif. Dari ke semua forum tersebut, muncul kesepahaman bahwa perlawanan terhadap kemunduran demokrasi tidak bisa dilakukan secara linier atau reaktif semata. Ia membutuhkan berbagai elemen kekuatan yang saling terkoneksi untuk menghasilkan perlawanan yang terorkestrasi secara kolektif. Masyarakat sipil harus berhenti bekerja dalam silo-silo (sekat) isu. Demokrasi bukan hanya soal partisipasi formal (*invited*) dalam pemilu, tetapi juga soal partisipasi yang dirancang secara khusus (*invented*) untuk merebut akses dan ruang dalam kesetaraan gender, keadilan iklim, maupun *holistic care*, dan lain-lain.

Catatan Refleksi ini akan dimulai dengan poin-poin refleksi tentang ekosistem demokrasi, dan dilanjutkan dengan penggalian poin-poin utama hasil diskusi, serta rekomendasi. Naskah ini menawarkan “**Ekosistem Demokrasi**”, sebuah tawaran kerangka pikir yang berasal dari model ekosistem organisasi secara mikro, dan diadaptasi, dikontekstualisasi, dan diperluas dan ‘dinaikkan’ untuk skala yang lebih luas untuk model gerakan OMS secara makro. Ciri dasarnya adalah ekosistem, yakni saling terhubung antar elemen gerakan (baik OMS, gerakan akar rumput, dan gerakan rimpang), saling berbagi peran, saling menopang dalam satu kesatuan; di mana satu kegagalan di satu sektor/peran dapat ditahan atau ditopang oleh kekuatan di sektor/peran lain. Penting bagi masyarakat sipil untuk

menyeimbangkan antara strategi advokasi kebijakan di tingkat atas (*top-down*), dengan penguatan basis massa di akar rumput (*bottom-up*) agar gerakan tetap solid, terhubung, dan memiliki legitimasi kuat. Lebih dari itu, menautkan dua jalur gerakan ini, yaitu OMS yang terlembaga dan gerakan rimpang yang bernapas pendek, adalah aspek penting dari ICSF 2025 dan menjadi fokus Catatan Refleksi ini.

Refleksi Utama

Berdasarkan hasil prosiding diskusi, ada lima poin refleksi utama. *Pertama*, tentang urgensi perluasan aktor, prinsip, dan strategi merebut ruang di tingkat lokal. Semakin menguat tren tertutupnya ruang publik, semakin bergeser gerakan warga dari partisipasi formal menjadi aksi “merebut” ruang publik secara organik guna melawan ketidakadilan dan menyikapi melemahnya kepemimpinan OMS tradisional. Strategi penguatan demokrasi ini dilakukan dengan mengonsolidasikan jejaring orang muda dan kolektif seni melalui kolaborasi strategis di tingkat lokal.

Kedua, tentang pentingnya mengenali tipe ancaman pada masyarakat sipil dan kesiapan menangannya. Meningkatnya represi terhadap aktivis di tengah regulasi yang mengancam demokrasi menuntut penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum yang saat ini masih memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk menghadapinya, masyarakat sipil perlu mengintegrasikan strategi perlindungan kolektif yang mencakup aspek fisik, digital, dan psikis guna memitigasi serangan dari aktor negara maupun non-negara. Upaya preventif dilakukan dengan memetakan pola ancaman secara sistematis serta membangun sistem respons cepat yang melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem OMS. Kolaborasi sumber daya dan solidaritas antarlembaga menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia di tingkat hilir.

Ketiga, tentang pentingnya memperkuat internal OMS berbasis pendekatan interseksionalitas, intergenerasi, dan keamanan menyeluruh (*holistic security*). Penguatan internal OMS dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang mencakup enam elemen kunci, mulai dari ruang sipil hingga inkubasi talenta. Fokus utama dari strategi ini adalah menciptakan kepemimpinan kolektif yang inklusif serta pembagian peran yang lebih kolaboratif antarlembaga. Melalui model ekosistem ini, OMS diharapkan mampu bertahan dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan politik yang sangat cepat. Upaya ini juga mencakup pemetaan risiko kolektif untuk membangun ketahanan organisasi secara menyeluruh.

Pendekatan interseksionalitas menjadi prasyarat penting untuk mengikat nilai kolektif dan solidaritas antarkelompok masyarakat yang beragam. Strategi ini mengharuskan OMS

untuk meruntuhkan ego sektoral demi membangun gerakan yang lebih cair, adaptif, dan berbasis komunitas. Selain itu, aspek keadilan antargenerasi ditekankan untuk memastikan peran substantif kaum muda dan menghindari praktik formalitas belaka atau tokenisme. Konsolidasi internal ini menjadi kunci utama dalam memperkuat ekosistem demokrasi melalui pelibatan kelompok yang paling rentan sekalipun.

Keempat, tentang pentingnya peran media alternatif sebagai ekosistem pendukung yang memproduksi narasi tanding dalam menaut gerak masyarakat sipil. Media alternatif memainkan peran sentral sebagai ekosistem pendukung yang mampu memviralkan isu-isu marginal dan kritik institusional yang sering diabaikan oleh media arus utama. Keberhasilan inisiatif seperti Project Multatuli dan Bandung Bergerak membuktikan bahwa kolaborasi erat antara jurnalisme aktivisme dan OMS dapat memperkuat legitimasi gerakan di mata publik. Melalui pembagian peran yang strategis, sinergi ini berfungsi sebagai penyambung agenda advokasi spesifik agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan dampak nyata.

Kelima, tentang peran gerakan tapak (*grassroot*) sebagai pusat dalam memperluas gerakan OMS dan korban. Gerakan tapak merupakan fondasi utama OMS yang lahir secara organik dari kebutuhan warga untuk melawan ketidakadilan dan melindungi ruang hidup mereka. OMS berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan politik dan penguatan kapasitas tanpa mendominasi agenda sejati yang dimiliki oleh komunitas akar rumput. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlawanan terhadap kebijakan eksploitatif tetap berbasis pada kedaulatan warga di tingkat lokal.

Masyarakat di tingkat tapak, khususnya perempuan, masyarakat adat, dan kelompok keberagaman seksual dan identitas gender (KSIG), menghadapi ancaman berlapis mulai dari kriminalisasi hingga perampasan ruang hidup akibat krisis iklim dan proyek strategis nasional. Lapis tantangan institusional berupa regulasi diskriminatif sering kali memarginalkan identitas mereka dan memperburuk kerentanan ekonomi serta sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan solidaritas horizontal yang inklusif untuk menyatukan berbagai isu sektoral menjadi agenda kolektif guna mendesak perubahan kebijakan yang lebih adil.

Butir-butir Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kerangka utama butir rekomendasi adalah pertautan, yang menjadi kata kunci dari ICSF 2025. Berdasarkan hasil diskusi yang sangat kaya di forum diskusi kelompok, baik di ICSF tingkat nasional dan di regional, tim penulis berupaya menyusun rekomendasi yang bersifat operasional, menekankan pada aspek *how*, bukan sebatas aspek *what*. Rekomendasi

perlu diperlakukan sebagai *work-in-progress* dan perlu diadaptasi secara berkelanjutan merespons konteks yang berkembang.

Pertama, pentingnya OMS memperkuat dirinya sendiri dalam strategi baru. OMS perlu memperkuat resiliensi internal melalui pendekatan interseksional, penguatan teknokrasi, dan analisis risiko politik secara berkala guna menghadapi tantangan sekuritisasi negara. Selain itu, OMS harus mengoptimalkan potensi donasi mikro dari warga sebagai strategi mobilisasi dana publik untuk mendukung gerakan melawan krisis demokrasi di Indonesia.

Kedua, penting untuk menaut kekuatan OMS dalam rangka membangun “ekosistem demokrasi”. Strategi utama dilakukan dengan menyatukan kekuatan OMS untuk membangun “ekosistem demokrasi” yang berbasis kolektif dan saling menopang. Ekosistem ini mengintegrasikan OMS berbasis isu/sektor, peran intermediari, serta sistem pendukung seperti media alternatif dan lembaga bantuan hukum untuk melindungi aktivis. Kolaborasi tersebut bisa diperkuat oleh kontribusi akademisi dan lembaga penelitian dalam memproduksi pengetahuan sebagai fondasi advokasi OMS dan bagian dari ekosistem demokrasi. Selain itu, jejaring ini harus meluas hingga ke luar lingkaran internal OMS dengan merangkul gerakan akar rumput orang muda yang berciri rizoma melalui pembangunan pusat kolaborasi (hub). Model ekosistem demokrasi ini ditujukan untuk melawan krisis demokrasi.

Ketiga, perlu untuk mengidentifikasi langkah pembentukan ekosistem demokrasi. Pembangunan ekosistem demokrasi dilakukan melalui lima langkah strategis, mulai dari menyepakati ancaman kolektif krisis demokrasi hingga memetakan lanskap OMS, yaitu aktor, sumber daya, dan relasi kekuasaan. Implementasinya bertumpu pada penguatan perankonektor lintas sektor, penyediaan infrastruktur bersama, serta pengalihan sentralisasi menuju replikasi gerakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keempat, perlu memetakan tantangan ekosistem, termasuk membangun legitimasi OMS *ecosystem builder* dan OMS *ecosystem feeder*. OMS perlu membangun legitimasi kolektif melalui pembagian peran konektor yang adil, seperti sistem rotasi, untuk mengatasi hambatan kepercayaan dan tingginya kompetisi antar lembaga. Selain itu, diperlukan strategi mitigasi konflik guna mengubah pola persaingan sumber daya yang saling menjatuhkan menjadi sinergi ekosistem yang suportif. Sementara dalam Catatan Kritis ICSF regional, telah teridentifikasi siapa konektor/jembatan pembentuk ekosistem.

Kelima, perlunya lembaga donor untuk meredefnisi kebijakan pendanaan agar lebih adaptif terhadap krisis demokrasi di Indonesia melalui penyediaan skema pembiayaan yang fleksibel dan berjangka panjang bagi gerakan masyarakat sipil.



1. Pengantar

1.1. Demokrasi Indonesia di tepi jurang dan strategi kolektif OMS

Banyak hal terjadi di tahun 2025 dan di awal 2026 terkait praktik demokrasi, kebebasan ruang sipil, dan nasib masyarakat sipil di Indonesia. Beberapa bulan sebelum penyelenggaraan ICSF November 2025, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi setidaknya di 112 titik yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Rentetan aksi adalah bentuk kemarahan kolektif warga memprotes kematian Affan Kurniawan saat aksi akhir Agustus, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sensitif di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang semakin sulit. Pemerintah merespon tuntutan rakyat dengan menggunakan pendekatan keamanan (sekuritisasi): menangkap dan memenjarakan para aktivis.

Saat Catatan Refleksi ini ditulis, banyak hal telah terjadi dan turut memengaruhi proses penulisan refleksi naskah ini. Indonesia mengalami krisis yang berlapis dengan banyak dimensi atau polikrisis. Terkait hal ini, bencana alam Sumatera sudah lebih dari sebulan terjadi, tetapi korban bencana masih tinggal di hunian sementara. Konversi hutan secara masif dan diubah menjadi perkebunan sawit adalah salah satu penyebab bencana banjir di Sumatera. Di awal tahun 2026, UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku, dan menambah daftar ancaman pada kebebasan sipil secara langsung, dan tanpa malu-malu. Banyak pasal dalam UU tersebut memberikan kewenangan pada penegak hukum untuk melakukan penyadapan, penyitaan barang pribadi tanpa izin, penangkapan sewenang-wenang, dan proses hukum yang tidak transparan; yang intinya mengurangi hak warga sipil. UU TNI yang memperluas peran dan kewenangan TNI di wilayah sosial telah lebih dulu disahkan pada Maret 2025, menambah paket regulasi yang menggunakan pendekatan keamanan. Narasi dan label diberikan pada pegiat masyarakat sipil sebagai ‘antek asing’, dan menurunkan legitimasi OMS di ruang publik. Demokrasi secara formal masih ada, misalnya penyelenggaraan pemilihan umum satu kali dalam lima tahun untuk memilih pimpinan eksekutif dan legislatif di empat tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa), tetapi kualitasnya sangat buruk bagi jaminan hak sipil. Hasil dari pemilu tersebut tidak selalu dapat menjamin kebebasan sipil. Yang tambah menyedihkan, pelanggaran negara atas hak warga negara mulai mengalami normalisasi oleh aktor negara sendiri.

Banyak kajian akademik yang sudah menjelaskan kondisi demokrasi Indonesia ini dengan menggunakan beragam istilah (Mietzner 2012; Hadiz 2017; Warburton dan Aspinall 2019; Diprose dkk. 2019). Penurunan ini sudah berlangsung sejak periode kedua Joko Widodo (Jokowi) 2019–2024; dan Jokowi dianggap berperan dalam melahirkan kembali

otoritarianisme (Jaffrey dan Warburton 2025). Kondisi Indonesia ini tidak unik. Secara global, gelombang balik (*backsliding*) kelahiran otoritarianisme dan proses otokrasi terjadi di banyak negara di dunia, dengan angka yang terus bertambah (V-Dem Institute 2025). Dalam catatan V-Dem Institute, Indonesia juga dianggap berubah menjadi rejim otokrasi, bukan lagi demokrasi

Proses otokratisasi memiliki dua ciri utama, yaitu menurunnya *kualitas institusi* penopang demokrasi elektoral seperti aturan main (*rules and regulation*). Scheppele (2018) menyebutnya sebagai “autocratic legalism”.¹ Ciri kedua otokrasi adalah bahwa penurunan kualitas demokrasi bersifat episodik, akumulatif, dan tidak terjadi dalam semalam (Lührman dan Lindberg 2019). Di Indonesia, operasi otokrasi bergandengan dengan kepemimpinan populis (berbentuk bantuan sosial dan penyediaan infrastruktur), dan karenanya mendapat dukungan besar dari publik. Ini ciri utama kebijakan Jokowi. Marcus Mietzner (2025) melabelinya sebagai “mayoritarianisme”, sebuah gaya kepemimpinan yang berfokus pada kelompok mayoritas rakyat.² Kelompok masyarakat sipil yang membela HAM, dianggap kelompok minoritas yang tidak relevan secara politik. Program-program populis yang dikritik oleh OMS, justru disukai oleh masyarakat kebanyakan, memosisikan sesama warga dalam posisi berlawanan (antara kelompok kritis minoritas dengan kelompok warga kebanyakan). Belum lagi label kelompok kritis OMS sebagai bagian dari “antek asing”. Akibatnya, legitimasi OMS di mata publik terus menurun, bukan karena apa yang dilakukan OMS tidak relevan, melainkan karena politik *framing* yang dilakukan rezim: ekonomi (pemenuhan kebutuhan dasar) lebih penting daripada politik (perlindungan hak sipil).³

1 Bentuk “autocratic legalism” ini adalah UU ITE, dan legalisasi KUHP yang kemudian dipakai untuk membungkam, merepresi terhadap demonstrasi (mahasiswa, buruh, petani) di setiap aksi; dan teror pada jurnalis, juga pesohor kritis. Pembatasan nilai dan ruang demokrasi tidak berlangsung secara dramatis, dan cepat; melainkan bertahap dan perlahan. Terkadang, tuntutan masyarakat sipil dipenuhi, misalnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Setiawan 2022), tetapi aturan turunannya tersendat dipenuhi. Pemerintah juga sering menggunakan strategi kolaborasi dengan LSM, misalnya mengajak awak LSM sebagai tim ahli dalam proyek pemerintah, melakukan patronase dalam bentuk hibah, meski secara normatif tidak ada ikatan, menggunakan pesohor dan pendukung untuk mendelegitimasi para aktivis anti-negara, dengan menuduh sebagai “anti-pembangunan”.

2 Di tengah ini, penanda utama demokrasi seperti pemilu, tetap berlangsung rutin setiap lima tahun. Tingkat partisipasinya pun selalu tinggi yakni lebih dari 80%. Akan tetapi, lembaga penyelenggara pemilu dikooptasi, dan lembaga pengawas dilemahkan. Inilah yang disebut sebagai *electoral democracy*, yakni tipe demokrasi yang semata ditandai oleh keberadaan pemilu. Soal proses, kualitas, dan hasilnya adalah hal lain. Hasilnya, pemilu bukan lagi alat rotasi kepemimpinan dan mendorong pemenuhan hak warga, melainkan sebatas alat memperkuat kelompok penguasa-oligarki, dan penguatan politik dinasti, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kualitas demokrasi inilah yang disebut sebagai “competitive authoritarianism”, sebuah sistem demokrasi yang memang kompetitif hanya saat pemilu, dan ia bersandingan dengan praktek pelanggaran nilai-nilai demokrasi (Levitsky 2020). Dalam situasi ini, lembaga pemeringkat demokrasi di dunia, V-Dem Institute, melabeli Indonesia berada di zona abu-abu, yakni antara ‘electoral democracy’ dan ‘electoral autocracy’ (V-Dem Institute 2025).

3 Aspinnall dkk. (2020) mengidentifikasi adanya kesenjangan pemahaman gagasan demokrasi, antara yang dipahami rakyat kebanyakan, dan yang dipahami aktivis. Bagi rakyat kebanyakan demokrasi adalah “terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi”. Bagi aktivis, demokrasi adalah “jaminan hak sipil warga negara”. Pemahaman atau wacana ini membawa kita kembali pada perdebatan di awal Orde Baru “economic first, democracy later”, atau “ekonomi sebagai panglima” (Masoed 1989). Saat itu, Presiden Soeharto sedang melawan para pembangkang yang mendukung hak politik.

Yang juga penting kita pahami adalah bagaimana proses otokratisasi ini terjadi. Jaffrey dan Warburton (2025) menjabarkan ada dua hal utama yang menandai proses otokratisasi. *Pertama*, penguatan kekuasaan pemerintah eksekutif (*executive aggrandizement*); *kedua*, pelemahan fungsi kontrol terhadap eksekutif termasuk yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yudisial, dan lembaga anti-korupsi; maupun yang dilakukan oleh masyarakat melalui partisipasi dalam segala aspek politik.

Selain makin tidak ramahnya kondisi politik domestik seperti dipaparkan di atas, ada dua konteks lain yang turut menekan kondisi yang dihadapi demokrasi Indonesia. *Pertama*, kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu yang didominasi oleh kebijakan luar negeri Presiden Trump: perang wacana rencana Amerika Serikat merebut Greenland di wilayah Denmark, peningkatan ketegangan Amerika Serikat-Iran, perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, dan yang terakhir Amerika Serikat mengembargo organisasi internasional mengakibatkan pendanaan sektor HAM terus menurun. *Kedua*, kondisi ekonomi domestik terus memburuk. Nilai mata uang dolar terus menguat daripada rupiah, sebagian disebabkan kebijakan ekonomi pemerintah yang berdampak pada penurunan kepercayaan pasar global pada Indonesian. *Ketiga*, program realokasi anggaran negara yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran, telah menghasilkan ancaman pada program-program layanan publik strategis seperti pendidikan dan kesehatan; dan berdampak pada kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak. Di luar kondisi *constraining* ini, ada juga dua kondisi *enabling*. *Pertama*, di luar komunitas OMS yang terlembaga (*institutionalized CSOs*), telah lahir gerakan-gerakan organik di seluruh negeri, kebanyakan didorong oleh orang muda, dan dikenal sebagai gerakan rimpang (*rhizomatic movement*); dan *kedua*, potensi mobilisasi sumber daya publik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung gerakan masyarakat sipil di Indonesia.

Dalam kondisi ini, apa yang bisa dilakukan OMS dan apa strateginya? Kegiatan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025, bertema “Defending Democracy, Demanding Justice: Uniting Civil Society”, berupaya mencari strategi tersebut. Tema ini sangat relevan dalam merespon ancaman berlapis pada nyawa demokrasi Indonesia. Kalau di tahun 2024, tema ICSF adalah “Merawat Dialog, Mendorong Perubahan: Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi”, di ICSF 2025, kata kerja “menautkan” terasa imperatif, sekaligus mengandung urgensi agar komunitas OMS memikirkan langkah konkret yang bisa dilakukan. Selain “menautkan” tema ICSF 2025 ini juga soal ‘mempertahankan’ (*defending*), dan ‘menuntut’ (*demanding*), yang menyiratkan evaluasi dan refleksi “apa yang sudah dan sedang dilakukan” OMS; dan apa yang bisa dilakukan dalam dua tahun ke depan”, setidaknya sebelum penyelenggaraan ICSF dua tahun ke depan pada 2027.

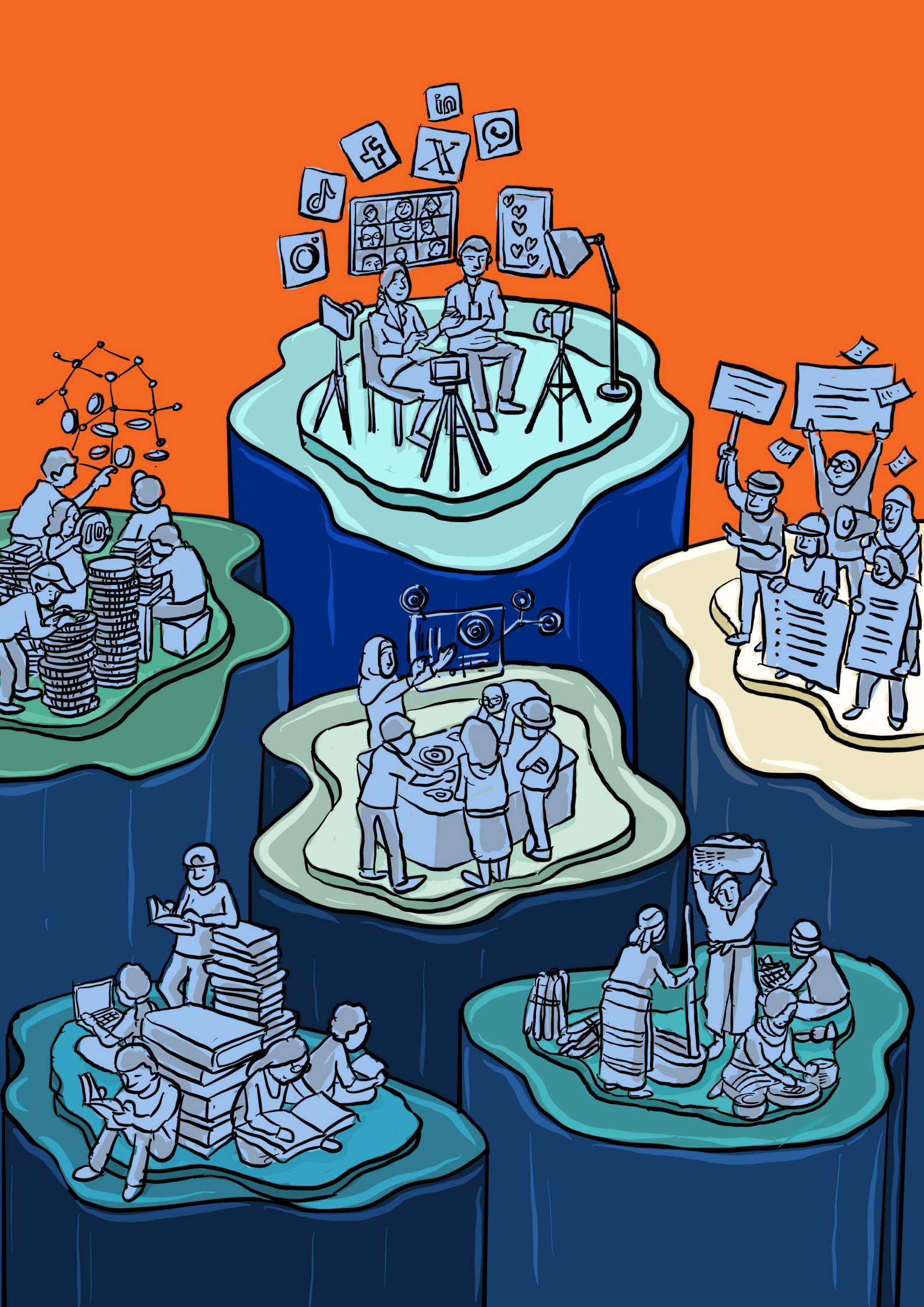
Naskah catatan refleksi ICSF 2025 ini terdiri dari empat bagian besar. Bagian pendahuluan berisi latar belakang Catatan Refleksi ini ini. Bagian kedua memaparkan kerangka pikir yang digunakan. Bagian ketiga berisi butir-butir catatan refleksi yang muncul di seluruh sesi ICSF; dan bagian keempat berisi poin-poin rekomendasi yang lebih operasional yang dapat dipikirkan dan dilakukan ke depan

1.2. Partisipan dan pengaturan sesi

ICSF tahun 2025 dihadiri oleh 299 peserta dari total 304 undangan yang berasal dari OMS dari 31 provinsi, dan 11 sektor/fokus isu yang didiskusikan dalam kelompok. Selain diskusi kelompok, forum ICSF dibuka oleh dua pidato kunci (*Keynote Speech*) oleh Atnike Nova Sigiuro, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Prof. Komarudin Hidayat; forum diskusi meja bundar (*roundtable discussion*), diskusi pemutakhiran situasi (*update discussion*), serta diskusi dan refleksi penutup. Dari segi kepesertaan, ada 90 orang (sekitar 30%) orang yang merupakan peserta baru, sedangkan sisa 70%-nya adalah peserta yang telah mengikuti ICSF sebelumnya (2018–2024). ICSF 2025 dihadiri oleh peserta yang beragam, yaitu perempuan, laki-laki, non-binary, maupun yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan gender tertentu. Dari segi kewilayahan, peserta ICSF terdiri dari tiga region, yaitu Jawa-Bali, Sumatra-Kalimantan, dan Nusa Tenggara-Sulawesi-Maluku dan Papua. Sebelum diselenggarakan di Jakarta, ICSF dilakukan di wilayah. Tiga kali penyelenggaraan ICSF, yakni di Bandung, Pontianak, dan untuk wilayah Indonesia timur, dilakukan secara daring. Total peserta di 3 kali penyelenggaraan adalah 260 peserta.

Dua kata kunci ‘mempertahankan’ dan ‘menuntut’ menjadi dasar penyusunan 10 tema-tema diskusi paralel kelompok. Dalam kelompok tema pertama (*defending*), ada lima sub-tema yang didalami, yakni sesi 1 “Bentuk inisiatif baru memperkuat organisasi masyarakat sipil dan kepemimpinannya” (*New forms for initiative in strengthening CSO capacity and leadership*); sesi 2 “Media baru dan peran-perannya” (*New forms of media and their role*); sesi 3 “Gerakan kolektif perempuan” (*Women collective action*); sesi 4 “Melindungi kemerdekaan dan kebebasan sipil” (*Protecting space for civil liberties and freedom*); dan sesi 5 “Mempromosikan perdamaian dan toleransi” (*Promoting peace and tolerance*).

Dalam kelompok tema kedua (*demanding*) di hari kedua, juga ada lima tema, yaitu sesi 6 “Perlawanan dari akar rumput” (*Resistance from below*); sesi 7 “Mendukung gerakan sosial baru/jaringan interseksi” (*Supporting new forms of social movement/intersectional network*); sesi 8 “Memberdayakan komunitas yang terpinggirkan” (*Empowering marginalized community*); sesi 9 “Kolaborasi intergenerasi dan kepemimpinan orang muda” (*Intergenerational collaboration and youth leadership*); dan sesi 10 “Pejuang lingkungan hidup” (*Environmental Defenders*). Penyelenggaraan ICSF di tiga wilayah juga berbasis pada tema dan struktur sesi yang sama. Hasil Catatan Refleksinya berbeda-beda, mengikuti kondisi setempat, dan hasil diskusi di masing-masing regional.



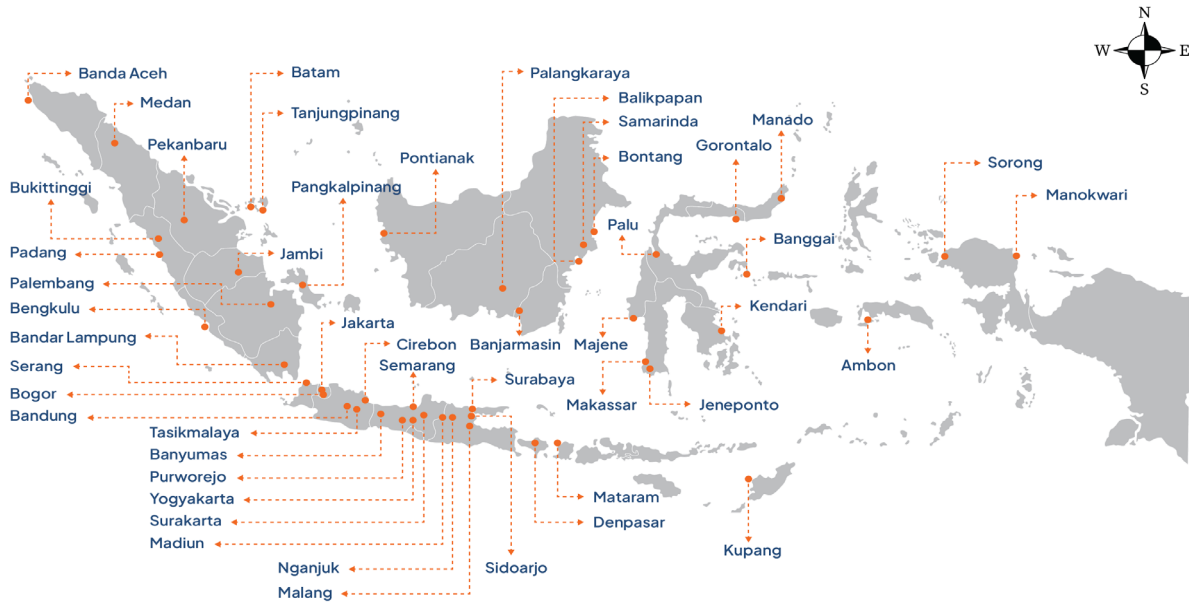
2. “Ekosistem Demokrasi”: Opsi Kerangka dan Model Strategi Kolektif OMS Melawan Otoritarianisme

2.1. Lanskap OMS, gerakan rimpang, dan peluang yang tersedia

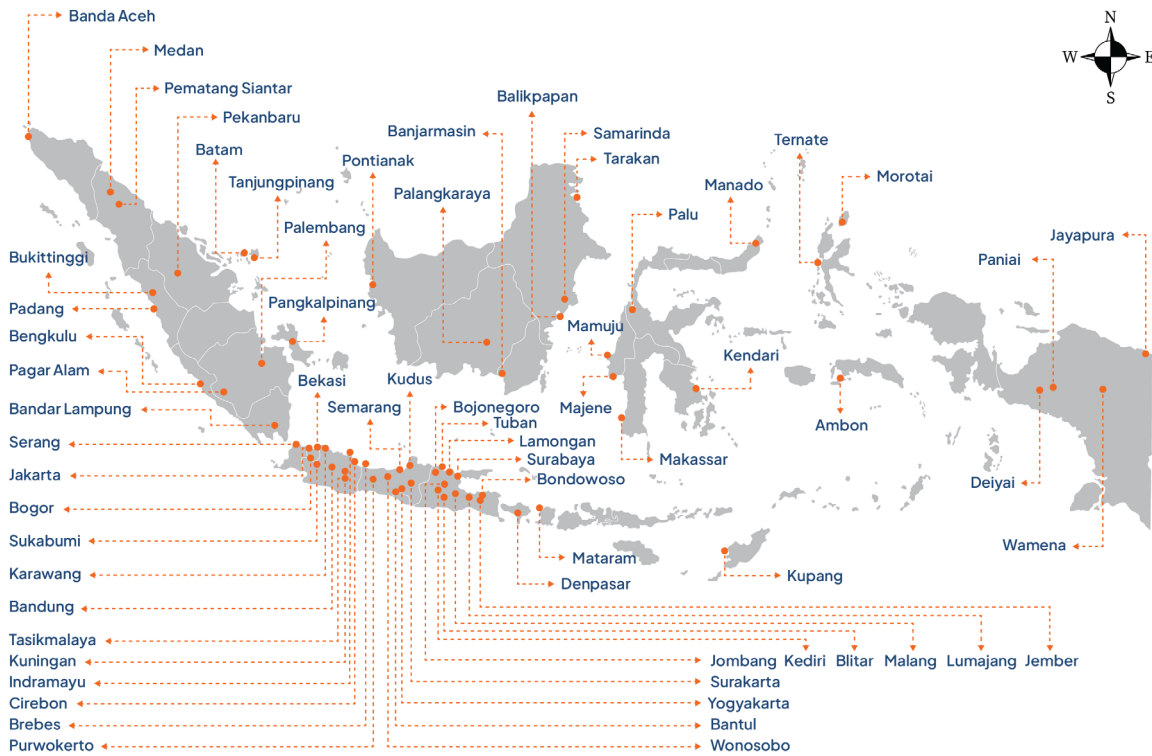
Telah banyak kajian yang memetakan ciri OMS di Indonesia, misalnya Antlöv dkk (2010). Secara internal, komunitas OMS berciri yang melemahkan, misalnya (a) tingginya pluralitas dan fragmentasi antar OMS (terpecah-pecah) berbasis isu dan kewilayahan; (b) terus meningkatnya krisis pendanaan yang berakibat banyak OMS gulung tikar; dan (c) lemahnya legitimasi di mata publik. Catatan refleksi ICSF 2024 mengidentifikasi belum terbentuknya ekosistem OMS yang solid untuk berbagi peran, berbagi sumber daya, dan berbagi risiko dalam merespon kondisi polikrisis demokrasi (YAPPIKA, 2025). Fragmentasi ini terlihat juga dalam bentuk persepsi OMS atas krisis demokrasi Indonesia saat ini. Banyak OMS, baik secara kelembagaan atau dari sisi pegiatnya, yang merasa tidak, atau belum terdampak/terkait dengan krisis demokrasi. Kriminalisasi aktivis belum dan tidak menjadi alarm penting akan makin nyatanya bahwa ancaman pada demokrasi. Tekanan fisik, psikis, dan pendanaan yang dihadapi OMS di sektor gerakan pro-demokrasi, belum menghasilkan solidaritas yang besar sesama OMS. Bagi banyak OMS, polikrisis demokrasi Indonesia dianggap belum menyentuh kepentingan mereka, dan menghasilkan praktik kelembagaan sehari-hari OMS yang bersifat *business as usual*.

Sebagaimana disebutkan di atas, di luar ancaman, ada juga peluang penting yang memperkuat gerakan OMS. *Pertama*, keberadaan dan penggunaan *platform* digital yang terus meluas dalam gerakan OMS dalam mengadvokasi kebijakan. *Kedua*, perluasan media alternatif akan wacana kritis pada publik. *Ketiga*, muncul dan meluasnya gerakan organik dari warga biasa di wilayah perkotaan yang dikenal sebagai gerakan rimpang atau gerakan *rhizomatic* (Savirani dkk. 2024; Sastramidjaja 2023), yang kebanyakan tidak ada kaitan sosiologis dengan gerakan OMS arus utama (*mainstream*). Gerakan orang muda, yang tidak selalu terkait dengan OMS yang terlembaga, telah meluas dalam bentuk komunitas-komunitas kecil yang tersebar dalam beragam sektor. Mereka menjadi motor gelombang aksi demonstrasi yang telah berlangsung sejak 2020. Gambar 1 dan 2 memperlihatkan peningkatan skala aksi mereka pada aksi #IndonesiaGelap di awal tahun 2025 dan #IndonesiaDarurat di pertengahan tahun yang sama. Kita bisa melihat bahwa aksi yang berlangsung tidak lagi hanya di ibukota provinsi, tetapi juga di ibukota kabupaten/kota. Sayangnya, gerakan ini berciri sporadik dan episodik, cepat muncul tetapi cepat padam, dan minim koneksi antar-mereka dan dengan OMS. *Keempat*, terus menguatnya kesadaran

publik dan warga negara biasa akan betapa buruknya kondisi saat ini. *Kelima*, penguatan donasi publik (meski bersifat *ad-hoc* dan humanitarian), tetapi berpotensi menjadi sumber alternatif gerakan OMS. Sumbangan dana publik yang diperoleh organisasi *human rights defenders* saat para aktivis ditangkap pada akhir Agustus 2025, memperlihatkan kepedulian publik pada isu-isu hak asasi manusia.



Gambar 1. Aksi #Indonesia Darurat 2025 dan sebarannya di seluruh Indonesia



Gambar 2. Aksi #Indonesia Gelap dan sebarannya di seluruh Indonesia

Melihat peta di atas, potensi kekuatan telah lahir, di tengah situasi keterbatasan yang dihadapi OMS. Menautkan dua moda gerakan (OMS yang terlembaga dan gerakan rimpang yang bernapas pendek) ini adalah aspek penting dari ICSF dan menjadi fokus Catatan Refleksi ICSF 2025 ini.

2.2. Mendorong pertautan melalui model “ekosistem demokrasi”: kerangka berpikir dan strategi

2.2.1. Demokrasi substantif

Salah satu kata kunci penting dalam mempertahankan demokrasi dan menuntut hak adalah praktik demokrasi berbasis warga kebanyakan (*popular democracy*). Istilah ‘demokrasi radikal’ atau demokrasi substantif, yakni jenis demokrasi yang tidak hanya menguntungkan kelompok elite, tetapi juga warga negara biasa. Ada situasi penting dalam kondisi demokrasi Indonesia saat ini. *Pertama*, demokrasi saat ini tersandera oleh kelompok kepentingan yang mempunyai kekuasaan material atau sumber kekuasaan, dan karenanya selalu mengalami proses yang tak selesai, dengan potensi kerusakan, tetapi sekaligus juga potensi untuk diperbaiki. *Kedua*, arena masyarakat sipil adalah situs perjuangan demokrasi substantif yang perlu terus diperjuangkan dan dijaga. *Ketiga*, demokrasi bukan saja soal ada/tidaknya model pemerintahan dan institusi di arena negara, melainkan praktik politik itu sendiri (oleh warga negara) dan karenanya demokrasi politik diorientasikan untuk melawan rezim yang mengeksklusi (Lloyd dan Little 2003). Selain itu, demokrasi harus terkait dengan kapasitas dan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan mereka sehari-hari; dan melalui proses yang juga bersifat rutin.

Bentuk demokrasi radikal adalah partisipasi dalam merebut ruang publik. Partisipasi di sini bukan semata partisipasi formal ritual seperti *nyoblos* pemilu, atau menjadi relawan sosial berbasis kemanusiaan, melainkan partisipasi yang dirancang secara khusus (*invented*), bukan semata *invited*. Secara luwes, kita bisa definisikan tipe partisipasi *invented* ini sebagai partisipasi ‘radikal’ atau *progressive participation*. Gerakan rimpang adalah bentuk praktik merebut ruang publik ini (Triwibowo 2025).

Model demokrasi ini perlu dilakukan dalam wadah yang komponen di dalamnya saling tersambung untuk menghasilkan aktivitas yang terorkestrasi dalam model ekosistem. Sebagaimana disebutkan di atas, ICSF 2024 menggunakan kerangka pikir ini, dan menysasar pada aspek internal kelembagaan OMS. Dalam kondisi demokrasi yang semakin di pinggir jurang, dan dengan kondisi OMS yang masih tercerai berai, Catatan Refleksi 2025 ini menawarkan ekspansi model ekosistem yang lebih luas, yakni “Ekosistem Demokrasi”.

Logika dasar cara kerjanya sama dengan ekosistem internal OMS (yang belakangan banyak digunakan dalam peningkatan kapasitas OMS Indonesia), hanya diperluas dan menyangkut elemen ekosistem lain, termasuk ekosistem pendukung (*supporting ecosystem*), seperti media alternatif kritis, para pembela hak asasi manusia, dan para penyedia layanan pada OMS (*service provider*). Melalui model ekosistem ini, proses “uniting” atau pertautan dilangsungkan.

2.2.2. Teori Ekosistem Demokrasi

Poin-poin Catatan Refleksi ICSF 2024 memfokuskan diri pada pengembangan ekosistem OMS, menggunakan dimensi ekosistem yang dikonseptualisasi oleh Schwarz (YAPPIKA, 2025). Ada enam elemen ekosistem ini, yaitu a) Ruang Sipil, b) Inkubasi dan akselerasi, c) Persepsi publik, d) Model pendanaan, e) Talenta dan pengetahuan, dan f) Konteks lokal. Ada 4 kegunaan utama pendekatan ekosistem dalam OMS, yaitu a) membantu mengidentifikasi dan merespon tantangan sistemik; b) mendorong kolaborasi dan kerja sama antara berbagai elemen OMS termasuk sektor, generasi, dan wilayah; c) mendorong inovasi dan uji coba kelembagaan; dan d) membantu menciptakan OMS yang tahan banting (*lenting*) dan berkelanjutan.

Teori ekosistem internal kelembagaan OMS dianggap opsi jalan keluar atas kerentanan yang terus dialami OMS secara jangka panjang, sekaligus mendorong keberlanjutan kerja-kerja OMS. Ancaman terus menurunnya pendanaan dari mitra-mitra pembangunan internasional, dan terus bergesernya tren tema di lembaga pendanaan internasional. Kerangka pikir “ekosistem demokrasi” ini berbasis pada penguatan ekosistem aspek internal organisasi, yakni teori ekosistem.⁴ Perlu dicatat, saat ini masih terbatas OMS yang menggunakan model ekosistem ini dalam kelembagaan OMS di Indonesia. Dalam tahun-tahun terakhir, lembaga yang memberi jasa pelatihan (*service provider*) telah mengintegrasikan model ekosistem ini ke dalam materi peningkatan kapasitas OMS yang diberikan.⁵ Hal ini perlu dipertahankan dan diperluas.

4 Tema-tema dalam diskusi kelompok ICSF mencakup dua dimensi sekaligus, yakni internal dan eksternal OMS. Dari 10 tema yang didiskusikan, ada dua tema terkait dengan aspek internal OMS, yakni a) penguatan kapasitas dan kepemimpinan OMS, dan b) topik intergenerasi dan kepemimpinan OMS orang muda. Dalam topik pertama, kerangka penguatan internal berbasis pada kerangka pikir ekosistem OMS. Ekosistem OMS merupakan tema payung kegiatan ICSF 2024. Kerangka ekosistem adalah salah satu alternatif mendorong keberlanjutan OMS dengan memperkuat kapasitas internal OMS sekaligus mendorong kolaborasi dan kerja sama secara terencana dengan OMS lain.

5 Lembaga seperti Inspirit (Inspirasi Tanpa Batas) merancang pelatihan menggunakan model ekosistem. Beberapa buku referensi juga telah ditulis termasuk “Fasilitasi Adaptif: Seni Memandu Perubahan Bersama, Menjadi Ecosystem Builder: Panduan Praktis Bagi OMS di Era Disrupsi, dan Peran-Peran Kunci Pada Ekosistem Perubahan Sosial” (Munggoro 2025).

Inti dari teori ekosistem adalah bahwa setiap organisasi (termasuk OMS) perlu berkolaborasi, berbagi peran, dan berbagi sumber daya dengan OMS lain guna melawan polikrisis demokrasi dalam satu kesatuan yang koheren. Praktik mirip dengan model ekosistem telah banyak dilakukan oleh OMS dalam bentuk koalisi berbasis isu, termasuk Koalisi Kebebasan Berpendapat (KKB), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) yang mengawal proses legislasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beberapa tahun lalu, dan berhasil menggolkan UU ini; dan banyak koalisi lain yang biasanya berbasis isu dengan agenda advokasi kebijakan. Beragam koalisi memiliki satu isu tunggal yang diperjuangkan secara kolektif, dan karenanya bisa dianggap sebagai prototipe ekosistem demokrasi. Perbedaannya dengan ekosistem demokrasi yang diusulkan dalam Catatan Refleksi ini adalah, *pertama*, jenis isunya bersifat luas, yakni demokrasi; dan *kedua*, tipe kolaborasinya menyangkut aktor yang juga lebih luas, termasuk media alternatif, pembela hak asasi manusia, penyedia jasa layanan bagi OMS (*service providers*), dan juga gerakan di luar yang dilakukan oleh OMS sendiri, yakni gerakan rimpang.

Kerangka pikir ekosistem merujuk pada teori organisasi khususnya organisasi bisnis, dan strategi inovasi di dalamnya. Ekosistem⁶ sendiri merujuk pada istilah biologi yang artinya “*a biological system composed of all the organisms found in a particular physical environment, interacting with it and each other, and its extended use on complex systems resembling this*”. Langerov dan Theros (2023) mengadopsi istilah ekosistem ini dikontekstualisasi kegiatan masyarakat sipil. Mereka menyebutnya sebagai ‘civic ecosystems’, yang didefinisikan sebagai: “*self-organizing systems of diverse and interdependent social actors held together by shared civic values*”. Kerangka ‘civic ecosystem’ dikembangkan, dan menjadi inspirasi ekosistem demokrasi dalam Catatan Refleksi ini, dengan tujuannya mendorong perubahan sosial dengan cara membuka potensi yang dimiliki aktor sosial yang beragam, dimana masing-masing OMS memiliki strategi dan teori perubahan sendiri, tetapi kesemuanya saling tersambung, dan saling mengisi, serta menguatkan satu sama lain.

Tsujimoto dkk. (2018) mengidentifikasi tiga ciri dasar ekosistem, yaitu a) jaringan organik yang saling menghidupi, tetapi juga saling mematikan (parasit dan predator karena kompetisi sumber daya); b) tiap elemen (aktor) ekosistem memiliki peran sendiri-sendiri; dan c) tetapi kesemuanya saling tersambung. Dengan cara ini, energi yang tersebar bisa tersatukan, dan penciptaan nilai (*value creation*) yang lebih besar dilakukan. Yang disebut ‘aktor’ dalam ekosistem pun tidak sebatas OMS tetapi beragam: kawan, lawan, dan bahkan orang yang sedang lewat di jalan (*bystander*) yang tak tau apa-apa.

6 Makna ekosistem tidak tunggal. Ada setidaknya empat kelompok besar literatur yang mendiskusikan istilah ekosistem secara berbeda-beda: a) yang terkait dengan ekosistem industri; b) yang terkait dengan ekosistem bisnis; c) yang terkait dengan manajemen platform, dan d) yang terkait dengan perspektif jaringan antar aktor (Tsujimoto dkk. 2018).

Kalau kita merujuk pada ekosistem dalam disiplin biologi, sebagaimana telah disampaikan di atas, ia menyangkut juga aspek persaingan dan praktik saling memakan (predator), sebagai hal alamiah yang terjadi di alam. Artinya, kerangka model ini juga memiliki risiko, khususnya ketika sumber daya makin menurun, dan kompetisi makin meningkat. Di sini, kita bisa mendeteksi adanya peluang dan tantangan dalam model ini. Memahami peluang dan tantangan yang dimiliki sistem ini, akan membawa kita pada kesadaran akan adanya keterbatasan dan bagaimana meresponnya.

Kerangka ekosistem pembela demokrasi ini berguna untuk dua tujuan sekaligus, *pertama*, penguatan internal kapasitas OMS dan pembagian peran berdasarkan fungsi dasarnya, termasuk menjadi keamanan menyeluruh (*holistic security*); dan *kedua*, berkoneksi dengan gerakan rimpang dengan tujuan memukul balik gelombang otorokrasi/otoritarianisme. Kerangka ekosistem memasukan di dalamnya gerakan rimpang yang berada di luar OMS dalam bentuk kolaborasi, komunikasi, dan inisiasi gerakan sejenis rimpang melalui pembentukan koalisi-koalisi cair. Tujuannya adalah mengonsolidasikan potensi yang tercerai berai dalam melawan kembalinya otoritarianisme dan bekerjanya ekonomi neoliberal yang merampas ruang hidup warga, komunitas; dan menghasilkan ketimpangan ekonomi yang menyusahkan rakyat. Di sini, otoritarianisme sebagai konteks besar yang dilawan oleh gerakan masyarakat sipil. Untuk itu, dua aliran kerangka pikir yakni penguatan masyarakat sipil secara internal dan tantangan eksternal (ekonomi politik) perlu disintesis.

2.2.3. Merancang Ekosistem Demokrasi

Kerangka pikir ekosistem ini bisa diadopsi dan diadaptasi untuk mencari jalan keluar melawan penurunan kualitas demokrasi yang dapat dilakukan OMS. Unit kerja ekosistem berbasis entitas yang lebih luas, tidak hanya pada satu spesifik unit (biotik dan abiotiknya) seperti kolam atau hutan; atau dalam hal ini satu OMS. Unitnya adalah sistem yang lebih luas yang mencakup peran dan jenis beragam OMS, termasuk OMS yang bergerak di pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian, advokasi kebijakan, lembaga pemikir, membangun narasi alternatif melalui media, gerakan protes di jalan, dan advokasi para pegiat/aktivis (Lihat Gambar 3).

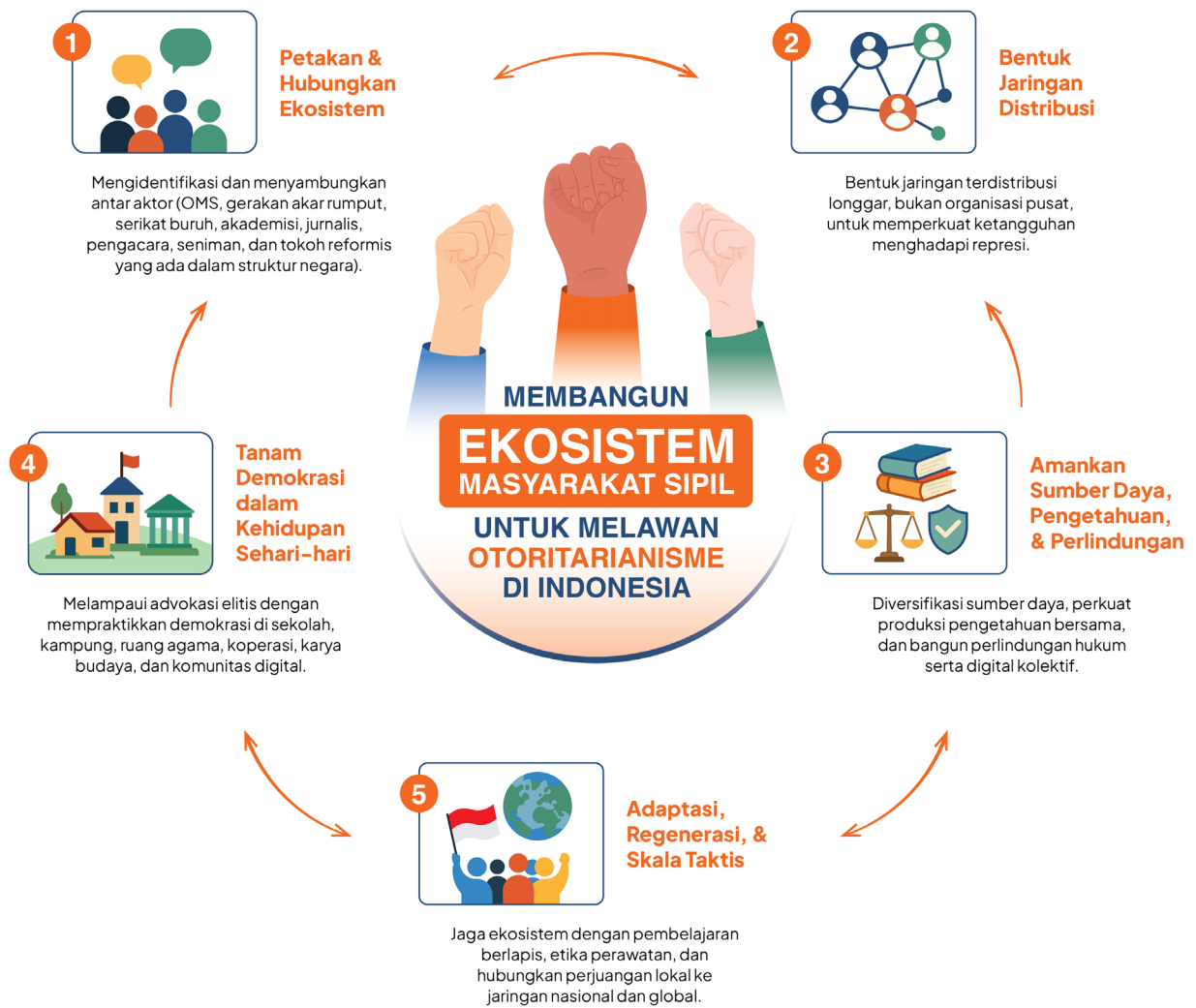


Gambar 3. Cara kerja OMS Indonesia berdasarkan fungsi

Ekosistem ini adalah model strategi kolektif merespon polikrisis demokrasi. Perlu dicatat, model ekosistem ini bertujuan ganda, ke dalam (internal OMS sendiri), dan keluar (gerakan demokrasi). ‘Ke dalam’ untuk menguatkan internal OMS; dan ‘Keluar’ untuk melawan penurunan demokrasi. OMS Indonesia dikenal sebagai “Palu Gada” (*Apa lo punya gue ada*), yang menunjukkan OMS Indonesia melakukan sendiri semua hal, termasuk melakukan penelitian, mengadvokasi, merancang materi kampanye, membuat konten media sosial, dan lain-lain. Hal ini menghasilkan OMS tertimbun dalam pekerjaan-pekerjaan tanpa batas. Dalam beberapa tahun terakhir telah mulai dipikirkan pentingnya OMS berbagi peran melalui kerangka ekosistem: tidak semua hal perlu dikerjakan oleh satu OMS, tetapi dapat berbagi peran. Dalam konteks pembicaraan ekosistem demokrasi, setiap OMS perlu memperkuat dirinya sendiri dulu, sebelum menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas. Ibarat terjadi kondisi darurat dalam penerbangan, seseorang perlu menggunakan masker oksigen terlebih dahulu, sebelum membantu orang lain menggunakan masker tersebut. Untuk menjangkau kedua elemen tersebut, OMS dapat dilakukan secara simultan, karena kerangka ekosistem internal memang juga menyangkut aspek eksternal, meski dengan porsi yang berbeda-beda. Keberlanjutan internal OMS perlu diletakkan pada skala yang lebih luas, yakni agenda keberlanjutan demokrasi, bukan hanya untuk keberlanjutan dirinya sendiri. Karena, kuatnya suatu OMS (secara individual), tidak akan membawa manfaat, kalau demokrasi telah berubah menjadi sistem otoriter.

Apabila diturunkan secara operasional, ada dua peran utama dalam pembentukan ekosistem, yakni *ecosystem builder* dan *ecosystem feeder* (Munggoro 2025). Sesuai dengan namanya, *ecosystem builder* adalah pembangun ekosistem; dan *ecosystem feeder* adalah peran khusus, yakni memasok, merawat, menyambungkan, atau memberi umpan pada ekosistem. Peran “uniting” mencakup juga peran *builder* dan *feeder* ini, yang bisa dilakukan secara kolektif oleh para OMS di Indonesia. Kita bisa mengadaptasi kedua istilah ini menjadi “*democracy ecosystem builder*” dan “*democracy ecosystem feeder*”. Kata ‘demokrasi’ di kedua istilah tersebut merujuk pada ‘tujuan’ dari ekosistem tersebut.

Ada lima elemen penting dalam membangun “ekosistem demokrasi” ini (Lihat Gambar 4). *Pertama*, memetakan ekosistem OMS yang sudah ada dan menyambungkan antar-ekosistem tersebut. *Kedua*, membentuk jaringan yang berciri longgar (*loose*) untuk membangun ketangguhan melawan represi. *Ketiga*, mengamankan sumber daya, pengetahuan, dan perlindungan dengan tujuan melindungi aktivis. *Keempat*, “menanam” nilai dan gerakan demokrasi dalam keseharian kehidupan warga; dan *Kelima*, mendorong adaptasi, regenerasi, dan strategi taktis.



Gambar 4. Langkah pengembangan ekosistem demokrasi melawan otoritarianisme



3. Butir–Butir Catatan Refleksi

Butir catatan refleksi ICSF 2025 ini berbasis pada dua komponen. *Pertama*, catatan ICSF regional di tiga wilayah (Bandung, Pontianak, dan Mataram), dan catatan ini menjadi basis butir refleksi 1. *Kedua*, pengelompokan sesi di dua hari penyelenggaraan ICSF 2025 berbasis pada dua tema utama “defending”, dan “demanding”. Meski secara formal terdapat pengelompokan rangkaian sesi *defending* di hari 1, dan rangkaian sesi *demanding* di hari 2, tekanan diskusi di masing–masing sesi bersifat jumbuh. Oleh karena itu, catatan refleksi tidak dilakukan berbasis pada pengelompokan sesi di hari penyelenggaraan ICSF, melainkan berbasis kata kunci “defending” dan “demanding”. “Defending” lebih bersifat internal ke gerakan, dan “demanding” lebih bersifat eksternal dalam variasi strategi yang digunakan OMS guna memperkuat tuntutan pada negara dan pada kondisi demokrasi yang memburuk.⁷

3.1. Refleksi 1: Pentingnya meluaskan aktor, prinsip, dan strategi merebut ruang di tingkat lokal untuk memperluas dan mengonsolidasi strategi perlawanan masyarakat sipil melawan peningkatan otoritarianisme

Maraknya gerakan warga memprotes ketidakadilan secara organik dalam bentuk ‘kolektif’ terjadi di berbagai daerah dan menjadi salah satu poin catatan refleksi ICSF regional di Bandung, Pontianak, dan Mataram. Dari kegiatan ICSF regional tersebut, ada beberapa catatan. *Pertama*, makin kuat tren tertutupnya ruang publik dan peningkatan praktik ketidakadilan. *Kedua*, model partisipasi yang muncul bukan lagi berbentuk partisipasi yang “invited”, melainkan “invented” dengan ciri “merebut” (*claiming*) ruang publik. *Ketiga*, adanya masalah internal yang dihadapi OMS dalam bentuk lemahnya kepemimpinan dan akibat lanjutannya pada penurunan legitimasi OMS di mata publik. Dari ketiga ciri tantangan di atas, ada pula ciri yang positif (*enabling*), yakni mulai tersambungnyanya gerakan LSM dan gerakan organik berbasis rizoma (rimpang), yang dimotori oleh orang muda (Triwibowo 2025a).

⁷ Singkatnya, butir refleksi kedua berbasis pada elemen “defending” yang mencakup sesi 1, beriringan dengan dua prinsip penting OMS yakni yang interseksionalitas (sesi 6), dan antargenerasi (*intergenerational*) (sesi 8). Dalam konteks “defending”, ada juga sesi lain yang merupakan sistem penopang (*support system*) gerakan OMS, yakni media alternatif (sesi 2) dan perlindungan pembela hukum/aktivis (sesi 9). Dalam konteks “demanding”, ada 5 sesi dan menjadi basis butir refleksi nomor 2. Butir refleksi nomor tiga berbasis pada strategi progresif yang dilakukan OMS (sesi 7), Gerakan kolektif perempuan (sesi 3); “Perlawanan dari akar rumput” (sesi 6); dan “Memberdayakan komunitas yang terpinggirkan” (sesi 8). Kelompok sesi “demanding” ini dilapisi oleh sesi yang membahas prinsip normatif yakni sesi 4 “Melindungi kemerdekaan dan kebebasan sipil”, dan sesi 5 “Mempromosikan perdamaian dan toleransi” (*Promoting peace and tolerance*).

Setiap wilayah memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing. Peluang berupa potensi kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam program-program pembangunan. Peluang lain adalah adanya pola kerja sama berbasis pada tipe proyek pemerintah, yakni swakelola 3. Yang juga sangat penting dan telah muncul adalah kelompok non-tradisional OMS, yakni kelompok/kolektif seni di berbagai tempat. Prinsip meluaskan gerakan OMS menjangkau sebanyak mungkin pihak adalah prinsip penting dalam mengelola ekosistem demokrasi.

3.2. Refleksi 2: Pentingnya mengenali tipe ancaman pada masyarakat sipil dan kesiapan menanganinya

Dalam pidato kunci sebagai pembuka acara ICSF, Dr. Atnike Nova Sigiro menekankan peningkatan tren otoritarianisme dan represi, dan pentingnya membangun infrastruktur HAM yang tangguh melalui sinergi strategis antara lembaga negara, gerakan masyarakat sipil, dan media independen untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Prof. Komarudin Hidayat menyoroti tantangan dalam merawat demokrasi di Indonesia yakni bahwa demokrasi gagal mewujudkan janji kesejahteraan dan keadilan, ditunjukkan dengan dominasi kelompok oligarki, peningkatan angka ketimpangan ekonomi, serta pengalihan kedaulatan rakyat sepenuhnya kepada partai politik pasca-pemilu sembari praktik pembajakan institusi negara oleh elit yang telah naik melalui instrumen demokrasi. Peran forum masyarakat sipil sebagai inkubator pejuang demokrasi, menjadi penting di sini, dan berfungsi melahirkan pemimpin yang berwawasan global, memiliki integritas, serta berkomitmen teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia.

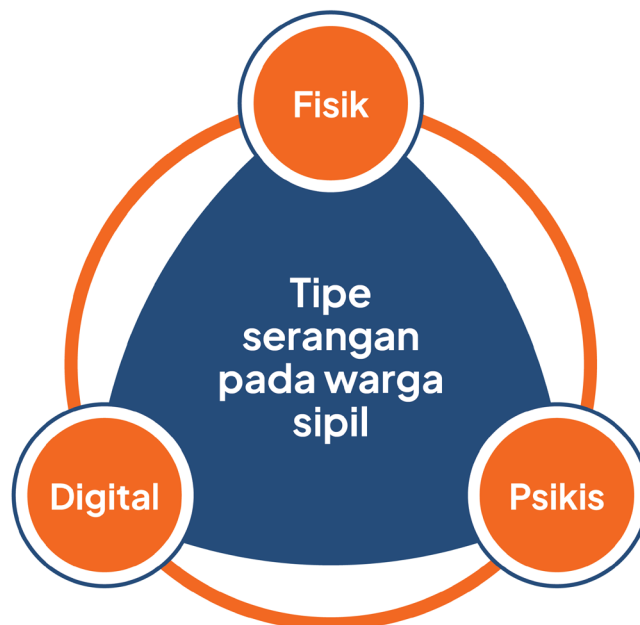
Poin ini untuk mengenali ancaman dielaborasi di Sesi 4 bertema “Melindungi ruang bagi masyarakat sipil di tengah legalisme otokratik”, yang dihadiri oleh 38 LSM⁸, dan difasilitasi oleh LBH Jakarta. Isinya memaparkan situasi represi yang dihadapi pegiat masyarakat sipil, dan keterbatasan yang dimiliki LSM yang kerja-kerjanya berfokus membela para pegiat HAM (*human rights defenders*). Kasus represi yang makin meningkat belum diiringi dengan kapasitas yang memadai para pembela HAM ini. Telah terjadi peningkatan kegiatan protes warga atas produk regulasi yang mengancam demokrasi seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law), UU KUHP, revisi UU KPK, UU Minerba, UU TNI, dan yang terakhir aksi Agustus-September 2025; dan ada lebih dari 1.000 orang di Jakarta yang ditangkap di aksi terakhir. Kapasitas pengacara publik LBH Jakarta hanya 4–5 orang. Dalam kondisi keterbatasan ini, dukungan elemen OMS seluas mungkin sangat dibutuhkan, untuk melindungi semua elemen masyarakat sipil. Inisiasi mengumpulkan sumber daya sudah dilakukan melalui TAUd

8 Peserta yang hadir pada sesi 4 berjumlah 38 orang dari berbagai organisasi.

(Tim Advokasi untuk Demokrasi), dan donasi publik. Untuk ini, dibutuhkan strategi yang terintegrasi, yakni a) struktur (perlu mengenali serangan dan mencari bantuan kemana); b) informasi publik yang berisi bagaimana melindungi diri ketika ada serangan; dan c) solidaritas, yakni melakukan perlindungan secara bersama-sama.

Hasil diskusi juga menggali pentingnya OMS untuk melakukan peran-peran preventif sebagai berikut: a) mengantisipasi berbagai serangan ini dalam bentuk peningkatan strategi pengamanan secara holistik meliputi fisik, digital, dan psikis di masing-masing OMS; b) penyusunan strategi mitigasi yang sistematis memahami pola serangan (aktor, bentuk, medium, dan dampak); mobilisasi sumber daya; dan respon kolektif berupa kejelasan langkah-langkah yang perlu diambil dalam bentuk *immediate responses* (respon segera sampai ancaman mereda), dan *follow-up responses* (pencegahan perulangan).

Diskusi kelompok menggali beragam ancaman kekerasan yang pernah dialami oleh OMS dan menggali: a) pola serangan; b) mobilisasi sumber daya; dan c) tipe respons yang diambil. Hasil diskusi menunjukkan beragam ancaman yang pernah dialami peserta sesi. *Pertama*, dari sisi aktor, pelaku ancaman selain aparat keamanan negara (polisi), juga pemilik modal (investor), dan elemen warga (preman, pesohor (*influencer*), *buzzer*, dan komunitas siber). Yang menjadi target intimidasi bukan hanya pegiat/aktivis, melainkan juga anggota keluarga mereka. *Kedua*, dari sisi topik, ada beragam isu yang diadvokasi termasuk diskusi isu 65, aksi buruh, dan penolakan investasi yang merusak lingkungan hidup.



Gambar 5. Variasi ancaman pada warga sipil

Sumber: Hasil diskusi *breakout* kelompok 5 "Mempromosikan perdamaian dan toleransi"

Secara kelembagaan, OMS yang fokus pada pembela pegiat HAM (*human rights defenders*), berada di sisi paling hilir dan paling strategis kegiatan advokasi baik secara kolektif maupun individual. Sebagaimana disebutkan di atas, meski memegang peran paling strategis, OMS seperti LBH memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Dalam model ekosistem, peran ini jelas perlu diperkuat dalam bentuk dukungan SDM dan keuangan yang memadai. Sumbernya bisa dari lembaga pendanaan, atau dari setiap OMS yang terintegrasi dalam ekosistem.

3.3. Refleksi 3: Pentingnya memperkuat kondisi internal organisasi masyarakat sipil, menggunakan pendekatan interseksionalitas, intergenerasi, dan keamanan menyeluruh (*holistic security*)

Empat tema diskusi *breakout room* dalam ICSF 2025 menggali penguatan kondisi internal OMS, yaitu sesi 1 “Bentuk-bentuk inisiatif baru peningkatan kapasitas dan kepemimpinan OMS”; sesi 6 “Gerakan akar rumput organik sebagai basis gerakan”; sesi 7 “Bentuk baru jaringan dan gerakan sosial berbasis interseksionalitas”; dan sesi 9 “Keadilan antar-generasi dan partisipasi bermakna orang muda”. Keempat tema ini secara tidak langsung merupakan aspek yang perlu diperkuat oleh kelembagaan internal OMS. Dalam keempat sesi ini, digali pula ikhtiar untuk memecahkannya. Satu hal yang terus mengemuka dalam sesi-sesi ini adalah tidak bisa OMS bergerak sendiri dalam menghadapi tantangan otoritarianisme. Kerja bersama perlu dikerangkakan oleh satu ekosistem yang saling menopang, termasuk dengan gerakan di luar OMS.

Inisiatif baru peningkatan kapasitas dan kepemimpinan OMS

Dalam sesi 1, yang dimaksud “inisiatif baru” terkait dengan jawaban atas pertanyaan model penguatan kapasitas OMS seperti apa yang kini paling relevan, dan bentuk kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan agar OMS mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan politik yang cepat? Jawaban atas pertanyaan ini menggunakan kerangka pemikiran ekosistem yang terdiri dari enam elemen, merujuk pada model yang dikembangkan oleh Civil Society Academy, yaitu:

- a. ruang sipil,
- b. lokasi dan peristiwa,
- c. talenta dan pengetahuan,
- d. model pendanaan,
- e. persepsi publik, dan
- f. inkubasi dan akselerasi.

Sesi ini diikuti oleh 28 OMS⁹ dan 2 mitra pembangunan, dengan fokus sesi “pemetaan kapasitas OMS dalam enam fungsi ekosistem, pemetaan risiko kolektif, dan *imaginary solutions sprint*”. Dari 6 komponen ekosistem, dan asesmen atas risiko di setiap komponen, diskusi melahirkan kata-kata kunci seperti “jejaring”, “hub gerakan”, “kepemimpinan kolektif”, “inklusif dan kolaboratif”, dan “pembagian peran”. Kata-kata kunci ini wujud dari operasi model ekosistem dalam masyarakat sipil. Aspek terpenting dalam kata-kata kunci baru ini, dan dalam konteks ekosistem OMS Indonesia, adalah aspek yang lebih operasional *how* untuk membangun ekosistem ini.

Interseksionalitas dan antargenerasi sebagai kerangka konsolidasi internal dan eksternal OMS

Selain inisiatif baru dalam kerangka kerja ekosistem ini, pendekatan baru, yakni “interseksionalitas” yang dialami di sesi 7¹⁰. Intisari dari isi sesi ini adalah pentingnya menggunakan kerangka interseksionalitas dalam gerakan masyarakat sipil (baik secara internal maupun eksternal). Sudah banyak komunitas/organisasi yang menggunakan kerangka ini termasuk “Jarik Rogo” dan “Koalisi Lintas Isu” di Yogyakarta, juga program yang dilakukan oleh Kemitraan yakni “Musyawarah Perempuan Nasional”, dalam mendorong pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan program pembangunan. Di tahun 2024, Kemitraan telah melakukan 500 kali kegiatan musyawarah di 664 desa yang melibatkan 5.000 orang perempuan, berkolaborasi dengan INKLUSI.

Untuk mendorong digunakannya kerangka interseksionalitas, dibutuhkan prasyarat yang terdiri dari tiga elemen utama: a) nilai atau *value* kolektif yang mengikat dan disepakati misalnya kesetaraan, keberagaman, dan berbasis solidaritas; b) Strategi, misalnya inklusif, *sharing* sumber daya (bisa material atau non-material), dan organisasi sebagai tempat bertumbuh; dan c) bentuk gerakan, misalnya cair/lentur, adaptif, kepemimpinan kolektif, berbasis komunitas, pertemuan informal yang rutin, dan lain-lain. Secara skematik, prasyarat mendorong interseksionalitas sebagai berikut:

9 Sesi ini diikuti 28 orang perwakilan OMS.

10 Sesi ini diikuti 29 orang perwakilan OMS.



Gambar 6. Prasyarat mendorong gerakan berbasis interseksionalitas dalam gerakan masyarakat sipil

Sumber: Hasil diskusi *breakout* kelompok 7 “Mendukung gerakan sosial baru/jaringan interseksi”

Selain prasyarat, ada tantangan yang dihadapi dalam mendorong digunakannya kerangka interseksionalitas oleh OMS, yang diidentifikasi oleh para peserta termasuk ego sektoral, perbedaan cara pandang, keterbatasan sumber daya, keberlanjutan, perbedaan kapasitas antar peserta, formalitas dan belum substantif, dan kondisi fisik geografis yang menyulitkan pertemuan-pertemuan rutin.

Lepas dari tantangan yang dihadapi ini, keseluruhan peserta diskusi di kelompok 7 ini menyepakati pentingnya interseksionalitas dalam gerakan masyarakat sipil, dan hal ini juga telah berlangsung dengan derajat yang berbeda-beda. Persoalannya pada kebutuhan untuk mengurangi ego sektor, dan mencari titik tengah. Semua sektor berkepentingan dengan kerangka pikir interseksionalitas, karena ia juga menjadi faktor *enabling* bekerjanya ekosistem demokrasi. Interseksionalitas adalah juga salah satu strategi menautkan (*uniting*), mempertemukan, memulai percakapan, menguatkan lintas sektor, sembari mengenali potensi perbedaan yang ada antar kelompok tanpa perlu mempersoalkannya. Di akhir sesi, ada refleksi yang menyatakan bahwa yang sudah disampaikan oleh peserta diskusi belum menjangkau kelompok sosial lain, yakni kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG), padahal mereka adalah kelompok paling rentan.

Selain itu, perlu dikenali bahwa masing-masing kelompok sosial ini bisa memiliki orientasi strategis yang berbeda-beda, dan ini tidak perlu dianggap sebagai kelemahan. Misalnya

dalam konteks program pemerintah Koperasi Desa, kelompok perempuan perlu mengambil peran, tetapi untuk kelompok KSIG ini tidak strategis.

Sesi lain yang membahas kondisi internal OMS adalah sesi 9 “Keadilan antar-generasi dan partisipasi bermakna orang muda”, yang diikuti oleh 33 OMS¹¹. Sama pentingnya dengan interseksionalitas, isu antargenerasi membongkar ketidakadilan generasi dalam kerja-kerja OMS. Dalam sesi, didiskusikan apa yang dialami oleh generasi muda di dunia OMS, misalnya bagaimana mereka sebatas pelengkap formal yang simbolis (tokenisme), dan belum memiliki peran yang substansial. Sesi juga diikuti oleh pegiat OMS generasi X dan generasi *baby boomers*, dan melahirkan percakapan antar-generasi. Metode sesi yang interaktif (misal pembagian kelompok menggunakan simulasi yang kreatif untuk membangun empati, dan membuat surat untuk ICSF 2030 ketika sebagian besar juga sudah menjadi generasi tidak muda lagi), menghasilkan percakapan yang jujur terkait gap antar-generasi ini.

3.4. Refleksi 4: Pentingnya memperkuat dan memperluas ‘ekosistem pendukung’ yakni media alternatif sebagai konter narasi untuk memperkuat agenda tautan (*uniting*) gerakan OMS

Media alternatif telah berperan sentral dalam isu-isu yang mendorong gerakan OMS dalam tahun-tahun terakhir ini. Ada 40 peserta OMS¹² dalam sesi 2, yang dikawal oleh Project Multatuli (PM) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sesi 2 mendiskusikan bentuk baru media dan peran-peran yang dapat dilakukan demi mendorong gerakan OMS. Telah ada praktik baik dimana media alternatif mendorong satu isu yang tidak diliput/diberitakan oleh media arus utama (*mainstream*). PM misalnya meliput kasus pemerkosaan anak oleh bapaknya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dan ibu si anak melapor pada polisi, tetapi diabaikan. PM menggunakan tagar *#PercumaLaporPolisi*, dan menjadi berita viral, sembari mengkritik peran institusi kepolisian dalam penanganan kasus-kasus pemerkosaan, dan perlindungan pada korban (yang kebanyakan perempuan dan anak).

Bandung Bergerak (BB) di Bandung yang berbasis kerja jurnalistik *cum* aktivisme, menjadi *platform* gerakan masyarakat sipil di Bandung, khususnya yang mengalami peminggiran dan represi dari negara. BB mendapatkan dukungan publik yang tinggi. Untuk bisa mencapai ini memang dibutuhkan syarat yakni konsisten dalam pemberitaan kelompok marginal dan selalu berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil seluas mungkin. Secara tidak langsung BB telah mendorong bekerjanya ekosistem gerakan dengan basis kegiatan kerja jurnalisisme.

11 Sesi ini diikuti 33 orang perwakilan OMS.

12 Sesi 2 ini diikuti 40 orang wakil OMS.

Menjangkau audiens yang luas membutuhkan konten yang menyangkut mayoritas warga. Di sini keterbatasan penggunaan media, karena ada isu yang diusung OMS bersifat sangat spesifik, dan tidak populer, seperti isu disabilitas. Minimnya perhatian publik pada isu ini membuatnya sulit mencuri perhatian publik, dan menjadi viral. Hal yang sama terjadi dalam RUU PRT, yang telah lama dikawal [Konde.co](https://konde.co). Selama 15 tahun, isu ini belum berhasil menjadi UU¹³. Dari diskusi sesi ini terlihat sentralnya peran media alternatif dan media sosial dalam kampanye isu. Kedua, pentingnya membangun ekosistem untuk berbagi peran siapa yang melakukan advokasi, dan siapa yang melakukan kampanye. Peran-peran bisa dilakukan secara kolaboratif antar OMS.

3.5. Refleksi 5: Sentralnya peran gerakan tapak (*grassroot*) dalam memperluas gerakan OMS, sekaligus yang mengalami ketidakadilan

Ada beragam strategi yang dilakukan oleh OMS terkait dengan organisasi tapak, dan 3 sesi membahas hal ini. Sesi 3 bertema “Gerakan kolektif perempuan” (*Women collective action*); sesi 6 bertema “Perlawanan dari akar rumput” (*Resistance from below*); dan sesi 8 mendiskusikan “Memberdayakan komunitas yang terpinggirkan” (*Empowering marginalized community*). Selain terkait strategi gerakan, ada dua sesi yang mendiskusikan prinsip normatif gerakan yakni sesi 4 dengan tema “Melindungi kemerdekaan dan kebebasan sipil” (*Protecting space for civil liberties and freedom*); dan sesi 5 “Mempromosikan perdamaian dan toleransi” (*Promoting peace and tolerance*). Sesi 4 menggali prinsip dasar demokrasi sebagai fondasi penting gerakan OMS, sedangkan sesi 5 terkait pentingnya jaminan kebebasan beragama.

Apabila dikelompokkan menjadi satu, ada kesamaan dari tiga sesi pertama, yakni pentingnya peran warga secara kolektif dalam gerakan OMS, dalam rangka melindungi diri mereka sendiri dan difasilitasi oleh OMS. Idealnya, gerakan kolektif berasal dari kepentingan warga sendiri, bukan proyek dari atas (dari OMS). Meskipun seringkali bisa juga kombinasi, mengingat keterbatasan warga dalam memahami apa itu hak yang dimiliki warganya, dan karenanya OMS melakukan pendidikan politik yang bersifat *top-down*, dan setelah dihasilkan penguatan komunitas, warga sendiri yang perlu bergerak secara kolektif.

Sesi 3 secara spesifik mendiskusikan isu perempuan dan pengalaman-pengalaman mereka secara langsung baik sebagai korban kekerasan maupun korban ketidaksetaraan

13 Saat Catatan Refleksi ini difinalisasi, RUU PPRT telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

dalam dunia yang sangat patriarkis. Ada 38 peserta OMS¹⁴ dalam sesi yang dikawal oleh Yayasan PEKKA, Solidaritas Perempuan, dan Yayasan Pulih. Sesi juga menggali bekerjanya interseksionalitas (sebagaimana yang didiskusikan dalam sesi 8), khususnya terkait eksploitasi sumber daya alam yang membawa dampak pada perempuan dan anak (Solidaritas Perempuan); dan penggunaan kerangka sosial-ekologis dalam strategi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak (Yayasan Pulih). Kasus yang disampaikan SP terkait dampak pembangunan PLTA di Poso, Sulawesi Tengah; juga di daerah lokasi PSN dalam proyek energi terbarukan, termasuk geothermal di berbagai lokasi seperti proyek Food Estate di Papua, Makassar New Port di Makassar, dan Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan. Hasilnya adalah penghancuran ruang hidup, hilangnya identitas, marginalisasi perempuan, dan feminisasi migrasi.

Senada dengan sesi 3, meski berbeda fokus, sesi 6 membahas gerakan dengan perspektif *bottom-up* (gerakan organik di akar rumput). Ada 46 peserta OMS¹⁵ dalam sesi yang dikawal oleh Gemawan. Tema ini merupakan tema penting sekaligus menyegarkan dan mengingatkan kembali bahwa akar OMS adalah warga di tingkat tapak. Ada pertanyaan kunci yang membekali diskusi ini, yakni pemetaan gerakan akar rumput di masing-masing wilayah tempat peserta berasal yang mencakup: a) apa isunya, b) siapa yang terlibat, c) apa bentuk dan taktik yang digunakan, dan d) siapa dan apa yang menjadi tantangan utama gerakan.

Dari segi tantangan, hambatan dan strategi ada kesamaan masalah yakni keterbatasan sumber daya (finansial) dan akses pada sumber daya, adanya ego-sektoral dari para pegiat, dan cara pandang para pegiat OMS yang belum melihat pentingnya mengaitkan diri dengan gerakan akar rumput. Dari sisi negara, kelompok akar rumput ini adalah sasaran para penegak hukum dalam mengkriminalisasi mereka.

Ada aspek kelembagaan OMS yang berulang muncul dalam diskusi (dan juga didiskusikan di sesi 1), dan solusi yang diidentifikasi adalah penguatan kapasitas di tingkat akar rumput, dan penguatan keterampilan terkait advokasi dan kampanye publik. Di sini, terlihat bahwa isu internal kelembagaan OMS sangat penting dalam mendorong penguatan gerakan OMS berbasis akar rumput. Dari sisi warga, keperluan membangun kesadaran politik juga penting dilakukan.

Di luar aspek kelembagaan OMS, ada aspek makro, yakni masih absennya tema dan arah strategis gerakan akar rumput yang dikawal oleh OMS. Di sini, kebutuhan refleksi ulang yang dilakukan secara kolektif antar-OMS sangat perlu untuk dilakukan. Fasilitator

14 Sesi 3 ini diikuti 38 orang perwakilan OMS.

15 Sesi 6 ini diikuti 46 orang perwakilan OMS.

sesi saat menutup sesi menegaskan bahwa gerakan organik adalah gerakan yang lahir secara alamiah dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini adalah bukti bahwa perlawanan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk dan konteks. Gerakan juga merupakan bagian dari dinamika sosial yang akan terus hidup dan berkembang sebagai respon atas ketidakadilan, sekaligus menjadi pondasi penting bagi penguatan masyarakat sipil di Indonesia.

Sesi 7 bertema “Strong solidarity, strong communities: Amplifying voices from the margins” (Kuatnya solidaritas, kuatnya komunitas: menggaungkan suara dari pinggiran), yang mirip dengan tema di sesi 6, dan dihadiri oleh 30 OMS.¹⁶ Sesi ini difasilitasi oleh Yayasan Humanis dengan empat tujuan, yaitu a) refleksi kondisi; b) pemetaan strategi yang sudah dilakukan; c) pemetaan modalitas organisasi; dan d) identifikasi agenda kolektif yang dapat didesakkan secara kolektif. Sesi dimulai dengan pemetaan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas di tingkat *grassroot* yang dilakukan oleh 3 pemantik dari 3 lembaga, yakni Narasi Toleransi dan Crisis Response Mechanism (CRM), Puspita Bahari (Semarang), dan Barisan Pemuda Adat Nusantara. Isi presentasi terkait dengan semakin besarnya tantangan kultural politik yang dihadapi kelompok minoritas dari aspek gender, iman/kepercayaan, orientasi seksual, dan adat minoritas; dalam bentuk tiadanya pengakuan bagi kelompok ini.

Selain aspek kultural sebagai lapis tantangan, *pertama*, ada lapis tantangan, *kedua* yakni aturan/regulasi. KSIG semakin terus menghadapi diskriminasi dari segi aturan. Ada 50 perda yang diskriminatif di berbagai daerah; perempuan di pesisir tidak diakui sebagai nelayan karena dalam aturan (UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan), yang dianggap nelayan adalah laki-laki; dan kelompok adat minoritas di berbagai wilayah di Indonesia bahkan dalam memberi nama kelompok, harus menggunakan nama “Barat” yang dikenali ketimbang nama lokal.

Lapis tantangan *ketiga* adalah kondisi global terkait krisis iklim dan eskalasi kegiatan ekstraksi sumber daya alam, serta dampaknya pada kelompok marginal. Perempuan yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa, khususnya di Timbulsloko, Semarang, setiap hari berhadapan dengan dampak krisis iklim. Di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, ada satu dukuh yang sudah tenggelam, dan kondisi ekonomi sangat rentan karena sulitnya mencari penghidupan dari laut; dan pembangunan jalan tol laut makin menyulitkan nelayan mencari ikan. Di Sumba, masyarakat adat mengalami tekanan kehilangan ruang hidup akibat konversi lahan menjadi sawit dan tambang. Di sini, kita melihat berlapisnya situasi yang dihadapi kelompok minoritas: dari sisi ekonomi, kultural (termasuk identitas yang tidak diakui), spasial (ruang hidup yang dirampas), dan krisis iklim.

16 Sesi 7 ini diikuti 29 orang perwakilan OMS.

Opsi strategi yang bisa dilakukan adalah mendorong program yang menguatkan kelompok ini, yang menghasilkan solidaritas. *Pertama*, komunitas muda berbasis adat melakukan tiga kegiatan utama yakni “gerakan pulang kampung” dengan melakukan penguatan ekonomi lokal dan membuat ruang belajar di desa; dan *smartphone movement* berbasis digital dalam bentuk merancang narasi tandingan tentang masyarakat adat yang dianggap “kanibal”, “bodoh”, dan “menolak modernitas”. *Kedua*, advokasi kebijakan khususnya RUU Masyarakat Adat. Untuk kelompok KSIG, lobi personal pada tokoh agama dianggap efektif untuk menghentikan pengusiran dan diskriminasi pada kelompok ini. Untuk kelompok perempuan pesisir, mengadvokasi proyek infrastruktur yang tidak menghilangkan ruang hidup.

Tantangan membangun solidaritas adalah sulitnya mencari *common issue* antar sektor gerakan. Peran LSM yang terlembaga juga dikritik, karena dalam konteks advokasi masyarakat adat, relasinya masih hierarkis (“membina”, “mendamping”, dan “mengajarkan”), ketimbang horizontal yang inklusif. Selain itu, LSM yang terlalu fokus pada keberlanjutan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan (*distrust*) yang tinggi pada LSM dan kelompok warga di akar rumput. LSM perlu mengambil peran strategis seperti menyambung antar-aktivitas *grassroot*, tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saat konflik lahir, melainkan terlibat dalam pengorganisasian warga.

Kalau sesi 8 menyinggung rentannya kelompok minoritas kelompok orientasi seksual, kelompok adat, perempuan di pesisir yang dihantam krisis iklim, sesi 4 secara spesifik mendiskusikan ancaman secara menyeluruh pada warga dan masyarakat, dan bagaimana strategi menanganinya. Sesi 5 bertema “Mempromosikan perdamaian dan toleransi” (*Promoting peace and tolerance*). Isi sesi merefleksikan perjalanan kegiatan mempromosikan perdamaian dan toleransi di Indonesia. Beragam tantangan diidentifikasi peserta seperti regulasi pemerintah, kebutuhan strategi dan metode mempromosikan perdamaian dan toleransi yang tidak normatif, dan terus menguatnya interseksi antar isu, termasuk generasi muda, dan perempuan sebagai *agency/promotor* perdamaian dan toleransi. Opsi mengatasi tantangan yang didiskusikan adalah memanfaatkan platform digital dalam mempromosikan ide, berbagi peran antar-OMS (tidak semua menjadi pemimpin), dan merawat komunikasi dengan tokoh masyarakat.

Sentralnya gerakan warga, termasuk gerakan akar rumput dalam beragam sektor dan kaitannya dengan kebutuhan konsolidasi gerakan OMS, digali dalam sesi pleno diskusi meja bundar (*roundtable discussion*). Sesi menyoroti krisis relevansi dan stagnasi OMS di tengah menguatnya kekuatan oligarki, represi, militerisme, dan era pasca-kebenaran. Para pembicara mengidentifikasi adanya kekosongan imajinasi politik kolektif yang membuat gerakan rakyat cenderung bertahan tanpa visi perubahan sistemik yang jelas. Kritikan

tajam muncul terhadap tradisi OMS yang selama ini bersikap a-politik atau non-partisan, yang dinilai justru melemahkan posisi tawar masyarakat sipil, dan menyebabkan kegagalan mengadvokasi isu-isu fundamental seperti hak asasi manusia.

Sebagai jalan keluar, diskusi ini mendorong transformasi strategi melalui konsolidasi politik yang lebih permanen dan lintas sektor untuk menghancurkan ego sektoral organisasi. Diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif, seperti gerakan rimpang orang muda yang berbasis nilai dan isu personal, serta pembangunan kekuatan politik dari akar rumput (*bottom-up*). Kesimpulan utama sesi ini menekankan bahwa berpolitik adalah sebuah keharusan bagi masyarakat sipil; OMS tidak boleh lagi hanya terjebak dalam agenda programatik, tetapi harus mampu membangun blok politik yang kuat untuk melakukan tawar-menawar dengan otoritas atau bahkan merebut kekuasaan demi kepentingan rakyat.





4. Berlayar Tanpa Jeda: Butir–Butir Rekomendasi

Pertautan (*uniting*) adalah kata kunci dari kegiatan ICSF 2025 ini, sekaligus menjadi kerangka penulisan butir rekomendasi Catatan Refleksi ICSF ini. Butir rekomendasi diupayakan bersifat operasional (menekankan aspek *how*, bukan sebatas aspek *what*). Sebagai rekomendasi, ia perlu diperlakukan sebagai *work-in-progress*, dan karenanya perlu dicermati dan diadaptasi terus menerus sesuai perkembangan situasi politik Indonesia dalam dua tahun ke depan (sebelum penyelenggaraan ICSF berikutnya). Meski demikian, ada kerangka kunci utama, yakni “ekosistem demokrasi” sebagai tawaran dari Catatan Refleksi ini. Pada saat yang sama, PR setiap OMS dalam membangun kelembagaan internal juga masih banyak, dan ini juga penting dikerjakan. Oleh karenanya, metafora “berlayar tanpa jeda” mungkin dapat mewakili situasi berlapis yang dihadapi OMS di Indonesia.

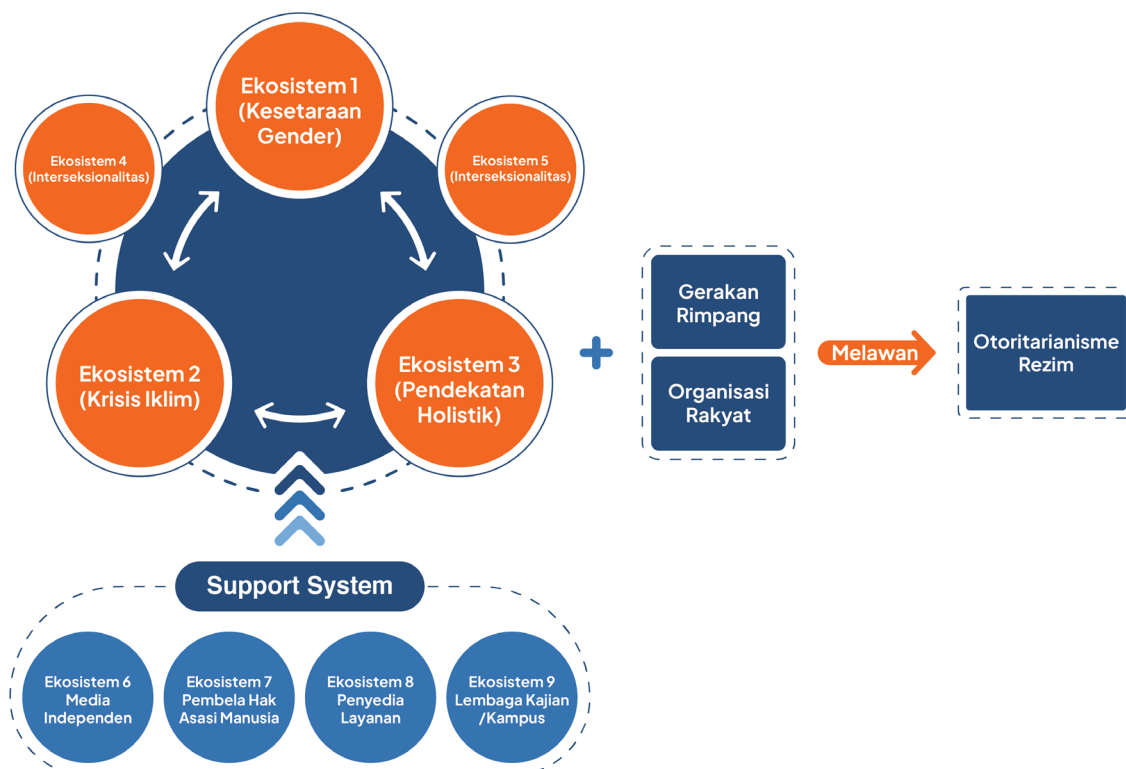
Pertama, pentingnya OMS memperkuat dirinya sendiri dalam strategi baru, seperti selalu mengadopsi prinsip dan pendekatan interseksionalitas dan intergenerasi dalam kerja kesehariannya; memperkuat aspek teknokrasi internal dalam rangka mendorong akuntabilitas untuk memperkuat legitimasi di depan publik. Penting bagi OMS untuk secara periodik membuat analisis risiko politik domestik yang akan sering dihadapi, serta rencana mitigasinya. Dengan cara ini, OMS bisa selalu sensitif dan adaptif berhadapan dengan peningkatan sekuritisasi yang dilakukan negara. Terkait dengan mobilisasi dana publik, OMS perlu mulai memetakan potensi, dan momentum penggalan dana publik oleh warga negara biasa yang terdorong berkontribusi dan berpartisipasi dalam melawan krisis demokrasi. Sebagaimana praktik di negara lain, donasi mikro (*micro donation*) dan mikro filantropi sedang menjadi tren model mobilisasi dana publik/warga negara dalam beberapa tahun terakhir (Ruesga 2011; Eikenberry 2006). Indonesia juga adalah negara paling murah hati di dunia, menurut laporan yang dikeluarkan “World Giving Index” (2024). Poin-poin ini dapat dianggap sebagai cara kerja baru OMS Indonesia dalam merespon krisis demokrasi dan menguatnya otoritarianisme.

Kedua, perlu dilakukan upaya konkret melakukan pertautan (*uniting*) kekuatan OMS dalam rangka membangun “ekosistem demokrasi”

Secara kolektif, OMS perlu melakukan perancangan model “ekosistem demokrasi”. Berdasarkan pemetaan hasil ICSF 2025, ekosistem demokrasi ini bisa berbasis pada 3 tipologi peran fungsi utama OMS: a) yang bekerja berbasis isu/sector (dengan kegiatan utama pemberdayaan, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian); b) yang berperan intermediari dan yang berperan sebagai entitas penopang (*support system*), seperti membangun narasi (media) dan membela aktivis HAM.

Di luar ketiganya, ada elemen masyarakat sipil lain yakni kampus/akademisi, lembaga penelitian (*think tank*), dan *service providers*, yang juga perlu menjadi bagian dari ekosistem ini. Ketiganya berperan dalam produksi pengetahuan, yang dapat menjadi fondasi advokasi OMS dan bagian dari ekosistem demokrasi. Sektor/isu yang dimaksud di sini adalah isu utama yang menjadi fokus OMS Indonesia, khususnya OMS yang masih memiliki dukungan sumber daya dari proyek pembangunan didukung lembaga donor (Lihat Gambar 6), seperti isu kesetaraan gender (yang dapat berupa satu ekosistem, diberi nama ekosistem 1), krisis iklim (ekosistem 2), dan satu isu penting yang juga sedang berkembang saat ini yakni ‘keperawatan menyeluruh’ atau *holistic approach* (ekosistem 3). Sektor-sektor tersebut tidak terbatas tiga saja (seperti Gambar 6), melainkan bisa berkembang menyesuaikan tren isu global. Antar-sektor ini terjadi juga irisan isu (interseksi) dalam bentuk kegiatan OMS misalnya perempuan yang terdampak dari krisis iklim (ekosistem 4, ekosistem 5, dan ekosistem 6).

Selain ekosistem berbasis sektor, ada satu jenis ekosistem yang berfungsi sebagai penopang ekosistem berbasis isu/sektor, yakni ekosistem media alternatif, dan ekosistem pelindung hak asasi manusia seperti lembaga bantuan hukum (ekosistem 6 dan 7 dalam Gambar 6). Selain itu, ada juga gerakan di luar OMS termasuk gerakan berciri rizoma, dan kebanyakan dilakukan oleh orang muda, termasuk mahasiswa. Kata kunci “kolaborasi”, “berjejaring”, dan “membangun hub” yang sering muncul di banyak sesi, perlu meluas tidak hanya pada internal sesama OMS saja, melainkan juga keluar dari OMS.



Gambar 7. Model “ekosistem demokrasi” di Indonesia

Gambar 7 di atas adalah penataan baru (*reconfiguration*) dari apa yang sudah dilakukan OMS, yang bersifat normatif, ideal, dan sebatas simulasi Ekosistem Demokrasi. Gambar 6 ini adalah peta sederhana keragaman OMS. Kenyataannya tentu lebih kompleks dari ini, termasuk sektor-sektor beragam. Gambar ini adalah tawaran sementara (*working framework*) yang dapat terus direfleksikan, dikritisi, dan direvisi, sebagai bentuk dari *work-in-progress*.

Ada empat elemen utama dari model ini. *Pertama*, ada tiga lingkaran besar di tengah berisi Ekosistem (ES) 1, 2, dan 3. Tiap ekosistem merepresentasikan pengelompokan OMS yang sudah ada di berbagai isu/sektor, termasuk isu gender, krisis iklim/lingkungan hidup, dan OMS yang bekerja dengan pendekatan keamanan menyeluruh (*holistic care*). Tentu saja ada ekosistem lain yang bisa dimasukkan dalam gambar. *Kedua*, ada OMS yang kegiatannya berbasis pada interseksi antar-sektor, akan menghasilkan ES 4, 5, dan 6, tetapi tetap tersambung dan bagian dari ekosistem. *Ketiga*, ekosistem penopang (*supporting*) yang ada di kotak bawah, dan terdiri dari media alternatif (ES 6), *human rights defender* (ES 7), *service provider* (ES 8), dan lembaga pemikir termasuk kampus (ES 9). *Keempat*, gerakan rimpang (*rhizomatic movement*) dan organisasi rakyat yang merupakan bentuk baru gerakan masyarakat sipil, perlu dijangkau/dilibatkan dalam ekosistem ini.

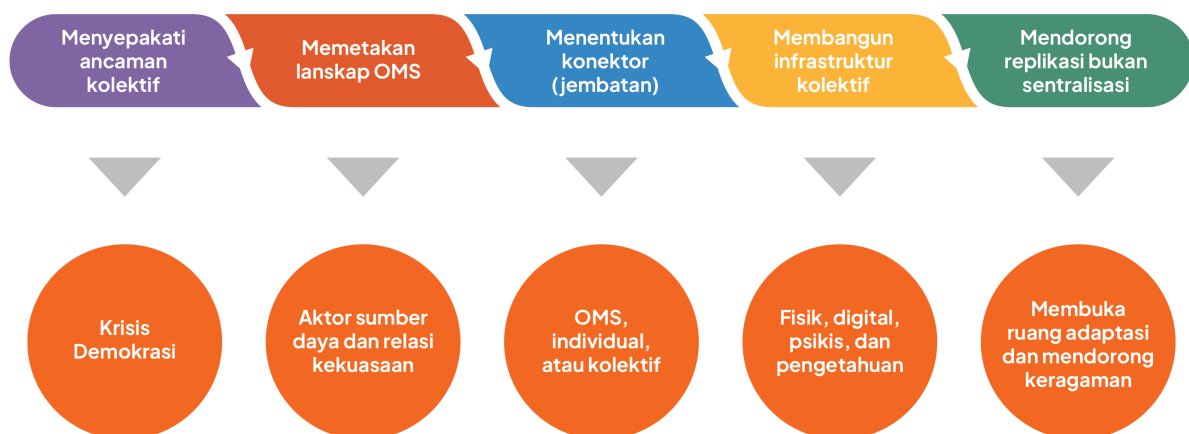
Bentuk lain pertautan adalah pembentukan “blok politik” yang muncul dalam diskusi meja bundar (*roundtable*) di hari kedua. Upaya pertautan antar elemen dapat berbentuk koalisi permanen lintas sektor dengan menggunakan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis pada kekuatan akar rumput yang sudah ada, termasuk gerakan rimpang dan organisasi rakyat berbasis massa/warga. Hasil diskusi menegaskan bahwa berpolitik melalui jalur institusi demokrasi seperti pemilu dan partai politik tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang haram bagi OMS, karena inilah arena pengambilan keputusan publik. Langkah jangka pendeknya adalah pembangunan “blok politik”.

Senada dengan itu, dalam sesi refleksi temuan kunci yang dipandu oleh Luky Djuniardi Djani menyoroti trajektori masyarakat sipil Indonesia yang saat ini sedang mengalami fase kemunduran demokrasi atau kegelapan demokrasi. Luky menggunakan analogi permainan ular tangga untuk menggambarkan fluktuasi demokrasi Indonesia selama tiga dekade terakhir, di mana saat ini kita berada pada kuadran empat yang dimetaforakan sebagai “Robohnya Surau Kami” (diambil dari judul novel klasik karangan AA Navis), sebuah metafora kondisi lemahnya masyarakat sipil secara sistemik di bawah dominasi negara yang kuat. Meskipun reformasi telah melahirkan berbagai lembaga demokrasi, tantangan struktural tetap berulang karena rezim terus belajar beradaptasi untuk menghadapi pola perlawanan masyarakat; sementara masyarakat sipilnya mengalami stagnasi dan keterbatasan imajinasi.

Yang kemudian dibutuhkan adalah konsolidasi gerakan OMS lintas sektor, lintas generasi, lintas isu, dan lintas arena. Fragmentasi OMS telah melemahkan daya tawar politik masyarakat sipil. Luky menekankan bahwa sering tuntutan OMS tidak terarah dan sering berujung pada tidak adanya perubahan yang nyata. Sebagai langkah strategis, masyarakat sipil direkomendasikan untuk membangun platform gerakan bersama yang demokratis, strategis, dan kolaboratif. Platform ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk menyatukan visi dan membangun kembali kekuatan sipil dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Ketiga, perlunya mengidentifikasi langkah pembentukan ekosistem demokrasi

Ada lima aktivitas utama untuk membangun ekosistem demokrasi, seperti dapat dilihat di Gambar 8 di bawah ini. Langkah pertama adalah menyepakati ancaman kolektif, dalam hal ini adanya krisis demokrasi di Indonesia. Langkah berikutnya adalah memetakan lanskap OMS yang terdiri dari pemetaan aktor, sumber daya, dan relasi kekuasaan. Dalam ekosistem, dibutuhkan peran konektor atau jembatan. Peran ini bisa dilakukan oleh OMS, individual, atau kolektif; dan peran ini bisa berlapis di tingkat nasional dan di lokal. Ini adalah langkah ketiga. Saat ini, telah terbentuk beragam “hub” di banyak program. Ini dapat menjadi langkah awal, dan dilanjutkan dengan merancang *platform* yang bertujuan mendorong komunikasi dan koordinasi antar “hub” lintas sektor dalam rangka memperbesar gerakan, termasuk beragam koalisi masyarakat sipil di banyak sektor yang sudah ada, termasuk gerakan rimpang, dan elemen aktor demokrasi lain seperti gerakan buruh. Langkah keempat adalah membangun infrastruktur bersama baik dalam bentuk fisik, digital, dan yang berisi pengetahuan dan strategi. *Sharing* adalah ciri penting ekosistem. Langkah terakhir terkait dengan langkah kedua, yakni menghindari sentralisasi sekaligus mendorong replikasi. Yang menjadi isu kunci adalah siapa yang akan melakukan ini? Perancangan model ini perlu dilakukan bersama (kolektif), dirancang secara bergilir, agar memiliki legitimasi kokoh di mata OMS sendiri.



Gambar 8. Langkah merancang ekosistem demokrasi dalam rangka mendorong pertautan

Keempat, perlunya memetakan tantangan ekosistem, termasuk membangun legitimasi OMS pembangun (*builder*) dan pemasok (*feeder*) ekosistem

Salah satu tantangan adalah membangun legitimasi kolektif agar pembagian peran dapat diterima oleh semua elemen OMS. Dalam catatan ICSF regional, isu soal siapa konektor/jembatan pembentuk ekosistem telah diidentifikasi (Triwibowo 2025a; Triwibowo 2025b; Triwibowo 2025c). Ini isu penting yang membutuhkan waktu untuk membangunnya. Kompetisi antar-OMS sangat tinggi, khususnya dalam mengakses sumber daya. Akibatnya perlu strategi kolektif khusus membangun legitimasi (khususnya saat mengambil peran konektor) pada satu atau dua OMS. Opsi yang tersedia adalah melakukan peran konektor ini secara bergantian/bergiliran. Tantangan kedua adalah membangun skenario saat terjadi proses kompetisi dan saling memakan, sebagaimana yang terjadi di alam fisik, saat terjadi persaingan dan saling memangsa (*predator*) antar-spesies dalam konteks kompetisi mengakses sumber daya.

Kelima, perlunya mendorong lembaga donor untuk mempertimbangkan kondisi krisis demokrasi Indonesia dalam politik pendanaannya, termasuk mendorong mekanisme yang fleksibel dalam pembiayaan program demi mendukung perlawanan atas krisis demokrasi Indonesia. Selain itu, karena pukulan balik demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di banyak negara di dunia, berjejaring dan membangun kekuatan kolektif global adalah penopang kekuatan domestik.

Referensi

- Antlöv, Hans, Brikenhoff, D.W., dan Rapp, E. 2010. "Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia." *Voluntas* 2: 417–439.
- Aspinall, Edward., Fossati, Diego., Muhtadi, Burhanudin., dkk. 2020. "Elites, masses, and democratic decline in Indonesia". *Democratization* 27(4): 505–526.
- Diprose, Rachel, Dave McRae, dan Vedi R. Hadiz. 2019. "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn". *Journal of Contemporary Asia*. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Eikenberry, A. 2006. "Giving Circles: Growing Grassroots Philanthropy". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 35, no. 3, September, 517–532.
- Hadiz, Vedi. 2017. "Indonesia's year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53 (3), 261–278.
- Jaffrey, Sana dan Eve Warburton. 2025. "Introduction: Jokowi's decades in power", dalam *The Jokowi Presidency Indonesia's Decade of Authoritarian Revival*, Sana Jaffrey dan Eve Warburton (eds). Singapore, ISEAS.
- Lloyd, Mora., dan Andrew Little. 2009. "Introduction", dalam *The Politics of Radical Democracy*, Edinburgh University Press, 1–12.
- Masoed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Ekonomi Politik Orde Baru*. Jakarta, LP3ES.
- Mietzner, Marcus. 2025. "Jokowi's world: Power, democracy and international contestation in Indonesia.", dalam *The Jokowi Presidency: Indonesia's decade of Authoritarian Revival*, disunting Sana Jaffrey dan Eve Warburton, 29–43.
- Munggoro, Dani. 2025. *Peran-peran kunci pada ekosistem perubahan sosial*. Jakarta: INSPIRIT.
- Munggoro, Dani. 2025. "Fasilitasi Adaptif: Seni Memandu Perubahan Bersama, Menjadi Ecosystem Builder: Panduan Praktis Bagi OMS di Era Disrupsi, dan Peran-Peran Kunci Pada Ekosistem Perubahan Sosial". Jakarta: INSPIRIT.
- Rangelov, Iavor., dan Marika Theros. 2023. "Civic ecosystems and social innovation: From collaboration to complementarity", *Global Policy*: 14: 797–804.
- Ruesga, G Albert. 2011. "Civil Society and Grassroots Philanthropy.", dalam *The Oxford Handbook of Civil Society*, diedit oleh Michael Edwards, 455–465. Oxford: Oxford University Press.
- Savirani, Amalinda., Yasih, Diatyka., dan Rakhmani, Inaya. 2025. *Mengakar dan Menyebarkan? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi*. Yayasan Kurawal. Penelitian belum dipublikasikan ARC UI dan POLGOV UGM. <https://www.kurawalfoundation.org/publikasi/menimbang-rimpang-unpacking-civil-society-in-post-authoritarian-indonesia>

Sastramidjaja, Yatun. 2023. "Rhizome vs regime: Southeast Asia's digitally mediated youth movements." *Trends in Southeast Asia*, No. 6. Singapore ISEAS.

Triwibowo, Darmawan. 2025a. "Defending Democracy, Demanding Justice: Uniting Civil Society". *Reflection Notes on Regional Consultation in Java and Bali Region*, 19–21 Agustus. Humanis.

Triwibowo, Darmawan. 2025b. "Defending Democracy, Demanding Justice: Uniting Civil Society". *Reflection Notes on Regional Consultation Sumatera and Kalimantan Region*, 19–21 Agustus Humanis.

Triwibowo, Darmawan. 2025c. "Defending Democracy, Demanding Justice: Uniting Civil Society". *Reflection Notes on Regional Consultation in Eastern Indonesia Region (Online)*, 20 Oktober. Humanis.

Tsujimoto, Masaharu, Kajikawa, Yuya, Tomita, Junichi, Matsumoto, Yoichi, 2018. "A review of the ecosystem concept — towards coherent ecosystem design". *Technology Forecast Social Change*. 136, 49–58. <https://doi.org/10.1016/J>.

Scheppele, K. Lane. 2018. "Autocratic Legalism". *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–584. <https://www.jstor.org/stable/26455917>.

V-Dem Institute. 2025. *Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?* 6 March. https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf.

Warburton, Eve and Edward Aspinall (2019), "Explaining Indonesia's democratic regression", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 41, No. 2 (August), pp. 255–285.

World Giving Index 2024, *Global Trends in Generosity*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi_2024_report.pdf

YAPPIKA. 2025, *Catatan Refleksi ICSF 2024*. [https://yappika-actionaid.or.id/uploads/downloads/Reflection_Note_ICSF2024_\(Redesign\).pdf](https://yappika-actionaid.or.id/uploads/downloads/Reflection_Note_ICSF2024_(Redesign).pdf)

Yetter, Roselie Vasquez (tanpa tahun), "Resiliency Framework", CIVICUS-PartnersGlobal.

